



**WE ARE READY
24 HOURS**



**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
TAHUN ANGGARAN 2017
TINGKAT - UAPA/B**



BAGIAN ANGGARAN (107)

**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)

TAHUN 2017

**Jl. Angkasa Blok B.15 KAV. 2-3 Kemayoran
JAKARTA PUSAT**



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL Pencarian
dan Pertolongan (BASARNAS)**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2018

Kepala Badan Nasional Pencarian
Dan Pertolongan (BASARNAS)

M. Syaugi, S.Sos., M.M
Marsekal Madya TNI



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional (LO)	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	30
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	66
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	84
VI. Daftar Rekening	
VII. Tindak Lanjut	
VIII. Lampiran-lampiran	



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL Pencarian
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB**

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

*JLN. ANGKASA BLOK B.15 KAV 2-3, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT
TELEPON 021-65701116, FAXIMILE 021-65701152*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018

**Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (BASARNAS)**

**M. Syaugi, S.Sos., M.M
Marsekal Madya TNI**



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.750.460.765,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember TA 2017 adalah Rp2.479.963.266.201,00 atau mencapai sebesar 97.55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.542.288.955.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 31 Desember TA 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.680.506.423.551,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp154.480.578.643,00, Aset Tetap sebesar Rp5.278.336.535.891,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp247.689.309.017,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.285.400.779,00 dan Rp5.676.221.022.772,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.652.777.517,00, sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp1.830.085.139.185,00, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.827.432.361.668,00). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp37.078.515.099,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.790.353.846.569,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp4.969.426.748.382,00 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp1.790.353.846.569,00), koreksi yang menambah Ekuitas Rp21.202.482.923,00 dan Transaksi antar Entitas Rp2.475.945.638.036,00 sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp5.676.221.022.772,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan (Audited) Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**FACE LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA)**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN 2016

Tabel.1

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2017		% thd ANGGARAN	TA 2016	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	3,750,460,765.00	-		3,620,232,697.00
JUMLAH PENDAPATAN		-	3,750,460,765.00	-		3,620,232,697.00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	351,451,250,000.00	325,329,860,088.00	92.57		324,425,371,923.00
Belanja Barang	B.2.2	631,318,201,000.00	607,306,887,336.00	96.20		563,056,111,289.00
Belanja Modal	B.2.3	1,559,519,504,000.00	1,547,326,518,777.00	99.22		1,371,216,736,596.00
JUMLAH BELANJA		2,542,288,955,000.00	2,479,963,266,201.00	97.55		2,258,698,219,808.00



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL Pencarian
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

FACE NERACA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN 2016

Tabel. 2

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	42.031,00	58.400.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	183.389.145,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	717.308.000,00	968.052.055,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	28.928.600.000,00	28.928.600.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.4	(27.322.670.000,00)	(20.047.790.000,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.5	1.605.930.000,00	8.880.810.000,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.6	5.220.000,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.7	(26.100,00)	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.1.8	5.193.900,00	-
Persediaan	C.1.9	152.152.104.712,00	108.678.780.853,00
Jumlah Aset Lancar		154.480.578.643,00	118.769.432.053,00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	303.615.044.275,00	295.988.170.730,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	7.910.772.864.082,00	6.739.147.011.994,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	871.645.179.876,00	693.285.656.382,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	46.592.688.404,00	37.384.048.773,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	19.284.334.945,00	9.356.315.345,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	680.670.000,00	1.142.780.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(3.874.254.245.691,00)	(3.056.280.222.269,00)
Jumlah Aset Tetap		5.278.336.535.891,00	4.720.023.760.955,00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	157.063.868.355,00	130.224.468.950,00
Aset Lain-Lain	C.3.2	219.142.248.577,00	69.646.712.858,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(128.516.807.915,00)	(64.336.727.803,00)
Jumlah Aset Lainnya		247.689.309.017,00	135.534.454.005,00
JUMLAH ASET		5.680.506.423.551,00	4.974.327.647.013,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	1.241.445.972,00	1.917.561.577,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.4.2	2.562.416.876,00	2.515.628.876,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.4.3	481.495.900,00	225.919.033,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.4	42.031,00	58.400.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	183.389.145,00
JUMLAH KEWAJIBAN		4.285.400.779,00	4.900.898.631,00
EKUITAS	C.5		
Ekuitas	C.5	5.676.221.022.772,00	4.969.426.748.382,00
JUMLAH EKUITAS		5.676.221.022.772,00	4.969.426.748.382,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.680.506.423.551,00	4.974.327.647.013,00



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**FACE
LAPORAN OPERASIONAL
(LO)**

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN SAR NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN 2016

Tabel. 3

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.652.777.517,00	10.417.180.987,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.652.777.517,00	10.417.180.987,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	325.452.202.464,00	319.852.967.147,00
Beban Persediaan	D.3	41.704.969.068,00	42.720.363.613,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	282.265.411.298,00	262.459.251.785,00
Beban Pemeliharaan	D.5	228.687.004.371,00	223.801.001.247,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	45.711.969.813,00	46.921.338.264,00
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.213.558.510,00	1.203.929.520,00
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	897.775.117.561,00	773.675.195.405,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	7.274.906.100,00	813.338.803,00
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		1.830.085.139.185,00	1.671.447.385.784,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.827.432.361.668,00)	(1.661.030.204.797,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(351.381.262,00)	(255.335.008,00)
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	D.10	125.441.507,00	18.378.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	476.822.769,00	273.713.008,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.429.896.361,00	84.479.933.013,00
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	D.11	101.009.065.868,00	89.082.615.725,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	63.579.169.507,00	4.602.682.712,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		37.078.515.099,00	84.224.598.005,00
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.790.353.846.569,00)	(1.576.805.606.792,00)
POS LUAR BIASA	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.790.353.846.569,00)	(1.576.805.606.792,00)



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**FACE
LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS (LPE)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED) DAN 2016

Tabel. 4

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	E.1	4.969.426.748.382,00	4.427.521.170.382,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.790.353.846.569,00)	(1.576.805.606.792,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	21.202.482.923,00	(136.180.477.941,00)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.5	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.6	1.550.077.637,00	8.502.639.500,00
SELISIH REVALUASI ASET	E.7	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.8	19.484.148.295,00	(144.682.927.194,00)
LAIN-LAIN	E.9	168.256.991,00	(190.247,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	2.475.945.638.036,00	2.254.891.662.733,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		706.794.274.390,00	541.905.578.000,00
EKUITAS AKHIR	E.11	5.676.221.022.772,00	4.969.426.748.382,00



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL Pencarian
dan Pertolongan (BASARNAS)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran di Indonesia. Organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Yang sekarang ini berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15, Kav. 2-3, Jakarta Pusat.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) mempunyai tugas dan fungsi membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Melalui peran tersebut diharapkan bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI”***.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR.

- Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
- Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
- Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditunjuk langsung oleh Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 (tiga) biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan, serta Biro Hukum dan Kepegawaian.

3. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi.

4. **Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan**
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang operasi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.
5. **Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan**
Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.
6. **Pusat Data dan Informasi**
Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.
7. **Inspektorat**
Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tabel. 5
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja

NO	URAIAN	SATKER
1	Kantor Pusat	1
2	Balai Diklat	1
3	Kantor SAR Type A	16
4	Kantor SAR Type B	22
	JUMLAH	40

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan (audited) T.A 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Pada tahun 2017, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 1 (satu) Unit Eselon I (UAPPA-E1) yang terdiri dari 40 kantor/satuan kerja.

Jumlah satuan kerja di lingkup Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan SAR Nasional adalah 40 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, satuan kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan (LK) dan dikonsolidasikan sejumlah 36 satuan kerja atau 100%. Sedangkan 4 satuan kerja yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan (LK) dikarenakan 4 satuan kerja tersebut baru berubah dari Pos SAR menjadi Kantor SAR dan belum mendapatkan DIPA/Anggaran.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA

1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

2) Pendapatan LO

- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan LO pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel. 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

e. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

f. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LRA)**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. adalah sebagai berikut.

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp3.750.460.765,

00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode pada tanggal 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016 adalah sebesar Rp3.750.460.765,00 dan Rp3.620.232.697,00 dengan kenaikan sebesar 3.60%. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (PNBP) Lainnya sebagaimana terinci pada Rincian Realisasi Pendapatan Badan SAR Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN) (Rp)	%
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	148,473,814.00	199,657,015.00	(51,183,201.00)	(25.64)
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	124,740,610.00	95,709,970.00	29,030,640.00	30.33
Penerimaan kembali belanja Modal TAYL	276,036,831.00	2,196,253,274.00	(1,920,216,443.00)	(87.43)
penerimaan kembali lain-lain TAYL	-	-	-	-
pendapatan jasa	-	15,768.00	(15,768.00)	(100.00)
Pendapatan dari pemindahtangan BMN lainnya	120,564,999.00	18,378,000.00	102,186,999.00	556.03
pend.pemanfaatan bmn	4,876,508.00	-	4,876,508.00	-
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-	-	-	-
pendapatan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	167,413,619.00	23,329,000.00	144,084,619.00	617.62
pend hasil denda dan sebagainya	-	-	-	-
pend.denda keterlambatan kerja	284,441,470.00	72,702,810.00	211,738,660.00	291.24
Pendapatan sewa gedung	2,615,077,200.00	1,014,186,860.00	1,600,890,340.00	157.85
Pendapatan Anggaran Lain-lain	8,835,714.00	-	8,835,714.00	-
TOTAL	3,750,460,765.00	3,620,232,697.00	130,228,068.00	3.60

Tabel. 9
Rincian Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 (Audited)

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		PENDAPATAN (Rp)
1	BASARNAS	2,810,092,757.00
2	KANSAR ACEH	-
3	KANSAR MEDAN	75,720,275.00
4	KANSAR PADANG	15,105,000.00
5	KANSAR P. BARU	-
6	KANSAR TJ PINANG	8,560,000.00
7	KANSAR PALEMBANG	-
8	KANSAR JAKARTA	223,126,700.00
9	KANSAR SEMARANG	2,160,076.00
10	KANSAR SURABAYA	21,977,005.00
11	KANSAR DENPASAR	-
12	KANSAR MATARAM	1,659,160.00
13	KANSAR KUPANG	80,082,809.00
14	KANSAR PONTIANAK	62,955,254.00
15	KANSAR BANJARMASIN	6,250,000.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	-
17	KANSAR MAKASSAR	2,958,216.00
18	KANSAR KENDARI	5,940,000.00
19	KANSAR MANADO	-
20	KANSAR AMBON	32,706,274.00
21	KANSAR BIAK	-
22	KANSAR JAYAPURA	37,446,650.00
23	KANSAR SORONG	9,406,079.00
24	KANSAR MERAUKE	26,738,132.00
25	KANSAR TIMIKA	8,280,714.00
26	KANSAR JAMBI	580,000.00
27	KANSAR P.PINANG	24,121,300.00
28	KANSAR BANDUNG	73,658,600.00
29	KANSAR PALU	583,871.00
30	KANSAR TERNATE	1,968.00
31	KANSAR BENGKULU	101,508,849.00
32	KANSAR LAMPUNG	-
33	KANSAR GORONTALO	555,000.00
34	KANSAR MANOKWARI	17,362,420.00
35	BALAI DIKLAT	95,780,006.00
36	YOGYAKARTA	5,143,650.00
TOTAL		3,750,460,765.00

Tabel. 10
Rincian Pendapatan Per Masing-masing Kantor

NO	SATUAN KERJA / KANTOR SAR	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	Penerimaan kembali belanja barang TAYL	Penerimaan kembali belanja Modal TAYL	Pendapatan. dari pemindahtang an BMN lainnya	pend.pemanfaa tan BMN	pendapatan penyelesaian Tuntutan Perbendahar aan	pend.denda keterlambata n kerja	Pendapatan sewa gedung	Pendapatan Anggaran Lain-lain	TOTAL
1	BASARNAS	-	36,044,500	126,600,000.00	-	-	-	53,252,457	2,594,195,800	-	2,810,092,757
2	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MEDAN	75,720,275	-	-	-	-	-	-	-	-	75,720,275
4	PADANG	-	-	-	15,105,000.00	-	-	-	-	-	15,105,000
5	P. BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TJ PINANG	-	-	-	8,560,000.00	-	-	-	-	-	8,560,000
7	PALEMBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	JAKARTA	141	-	-	-	-	164,578,619	58,547,940	-	-	223,126,700
9	SEMARANG	2,160,076	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160,076
10	SURABAYA	2,752	7,620,000	-	-	-	-	14,354,253	-	-	21,977,005
11	DENPASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MATARAM	1,260,160	-	-	-	-	-	399,000	-	-	1,659,160
13	KUPANG	-	-	-	50,999,999.00	-	-	29,082,810	-	-	80,082,809
14	PONTIANAK	254	43,303,000	17,397,000.00	-	-	2,255,000	-	-	-	62,955,254
15	BANJARMASIN	-	-	-	2,250,000.00	4,000,000	-	-	-	-	6,250,000
16	BALIKPAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	MAKASSAR	-	1,060,000	1,898,216.00	-	-	-	-	-	-	2,958,216
18	KENDARI	2,340,000	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	5,940,000
19	MANADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	AMBON	-	-	11,824,874.00	-	-	-	-	20,881,400	-	32,706,274
21	BIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	JAYAPURA	22,195,150	-	-	5,650,000.00	-	-	9,601,500	-	-	37,446,650
23	SORONG	5,465,360	-	-	-	-	-	3,940,719	-	-	9,406,079
24	MERAUKE	5,938,132	-	-	20,800,000.00	-	-	-	-	-	26,738,132
25	TIMIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	8,280,714	8,280,714
26	JAMBI	-	-	-	-	-	580,000	-	-	-	580,000
27	P. PINANG	2,252,000	14,249,000	-	7,500,000.00	-	-	120,300	-	-	24,121,300
28	BANDUNG	-	2,190,000	61,768,600.00	9,700,000.00	-	-	-	-	-	73,658,600
29	PALU	-	28,871	-	-	-	-	-	-	555,000	583,871
30	TERNATE	1,968	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968
31	BENGKULU	29,840,224	13,120,239	56,548,141.00	-	-	-	2,000,245	-	-	101,508,849
32	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	GORONTALO	555,000	-	-	-	-	-	-	-	-	555,000
34	MANOKWARI	10	-	-	-	-	-	17,362,410	-	-	17,362,420
35	BALAI DIKLAT	170	-	-	-	-	-	95,779,836	-	-	95,780,006
36	YOGYAKARTA	742,142	3,525,000	-	-	876,508	-	-	-	-	5,143,650
TOTAL		148,473,814	124,740,610	276,036,831	120,564,999	4,876,508	167,413,619	284,441,470	2,615,077,200	8,835,714	3,750,460,765

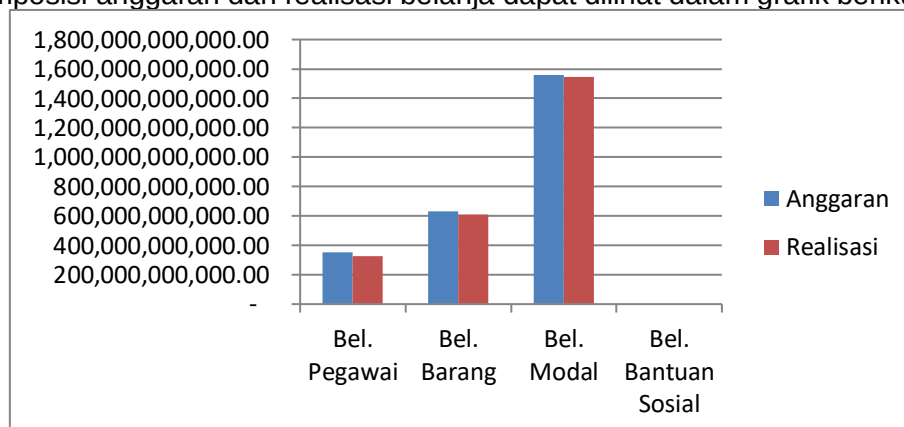
B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk periode pada tanggal 31 Desember 2017 (Audited) adalah sebesar Rp2.479.963.266.201,00 atau 97.55% dari anggaran belanja sebesar Rp2.542.288.955.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 pada 31 Desember tersaji sebagai berikut:

Tabel. 11
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja pada 31 Desember 2017 (Audited)

URAIAN	2017			2016
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.	REALISASI
Belanja Pegawai	351,451,250,000.00	327,967,625,787.00	93.32	324,425,371,923.00
Belanja Barang	631,318,201,000.00	607,682,876,117.00	96.26	563,056,111,289.00
Belanja Modal	1,559,519,504,000.00	1,547,341,690,761.00	99.22	1,371,216,736,596.00
Total Belanja Kotor	2,542,288,955,000.00	2,482,992,192,665.00	97.67	2,258,698,219,808.00
Pengembalian Belanja	-	(3,028,926,464.00)	(100.00)	(7,069,915,679.00)
Total Belanja	2,542,288,955,000.00	2,479,963,266,201.00	97.55	2,251,628,304,129.00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk periode pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel.12
Realisasi Belanja berdasarkan Program

PROGRAM	2017		%	2016
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
Program Dukungan Manajemen SAR dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	548,909,653,000.00	516,949,636,242.00	94.18	497,029,195,161.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164,555,810,000.00	156,143,124,218.00	94.89	68,699,777,063.00
Program pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	1,828,823,492,000.00	1,809,899,432,205.00	98.97	1,700,039,163,263.00
Total Belanja Rupiah Murni	2,542,288,955,000.00	2,482,992,192,665.00	97.67	2,265,768,135,487.00
Pengembalian Belanja	-	(3,028,926,464.00)	(100.00)	(7,069,915,679.00)
Total Belanja	2,542,288,955,000.00	2,479,963,266,201.00	97.55	2,258,698,219,808.00

Tabel. 13
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 (Audited) dan TA 2016

URAIAN	REALISASI T.A 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	325,329,860,088.00	324,425,371,923.00	0.28
Belanja Barang	607,306,887,336.00	563,056,111,289.00	7.86
Belanja Modal	1,547,326,518,777.00	1,371,216,736,596.00	12.84
TOTAL	2,479,963,266,201.00	2,258,698,219,808.00	9.80

Belanja Pegawai
Rp325.329.860.088,
00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp325.329.860.088,00 dan Rp324.425.371.923,00 Kenaikan ini sebesar 0.28%, hal ini disebabkan adanya Penataan dan Pengembangan Kelembagaan di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan Nomor: SK.KBSN-06/I/BSN-2017 tanggal 12 Januari 2017.

sebagaimana terinci pada perbandingan rincian Belanja Pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut:

Tabel. 14
Perbandingan rincian belanja pegawai Desember 2017 dan 2016

URAIAN	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	NAIK/ (TURUN)
			%
Belanja Gaji Pokok PNS	111,814,729,068.00	110,726,385,170.00	0.98
belanja pembulatan gaji PNS	2,088,947.00	2,049,970.00	1.90
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	7,309,388,388.00	6,792,281,703.00	7.61
Belanja Tunj. Anak PNS	1,835,248,922.00	1,635,136,242.00	12.24
Belanja Tunj. Struktural PNS	2,442,820,000.00	2,365,170,000.00	3.28
Belanja Tunj. Fungsional PNS	12,454,219,000.00	5,506,111,000.00	126.19
Belanja Tunj. PPh PNS	84,591,158.00	475,969,352.00	(82.23)
Belanja Tunj. Beras PNS	7,068,328,030.00	6,718,787,160.00	5.20
Belanja Uang Makan PNS	21,057,153,600.00	20,456,963,412.00	2.93
Belanja Tunj. daerah terpencil	192,650,000.00	197,525,000.00	(2.47)
Belanja Tunj. Khusus papua	1,746,175,000.00	1,772,665,000.00	(1.49)
Belanja tunjangan SAR PNS	30,609,845,000.00	30,216,250,000.00	1.30
Belanja Tunj. Lain-lain/uang duka PNS	-	-	-
Tunjangan umum PNS	3,431,895,000.00	7,050,215,000.00	(51.32)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Tunjangan khusus/ Kegiatan	127,918,493,674.00	137,178,152,150.00	(6.75)
Jumlah Belanja Kotor	327,967,625,787.00	331,093,661,159.00	(0.94)
Pengembalian belanja pegawai	(2,637,765,699.00)	(6,668,289,236.00)	(60.44)
Jumlah Belanja Bersih	325,329,860,088.00	324,425,371,923.00	0.28

Tabel. 15
Rincian Belanja Pegawai 31 Desember T.A 2017 (Audited)
per masing-masing Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		PEGAWAI (Rp)
1	BASARNAS	149,618,356,279.00
2	KANSAR ACEH	6,176,295,462.00
3	KANSAR MEDAN	7,258,162,058.00
4	KANSAR PADANG	5,140,876,523.00
5	KANSAR P. BARU	4,967,214,152.00
6	KANSAR TJ PINANG	6,052,617,353.00
7	KANSAR PALEMBANG	4,135,784,069.00
8	KANSAR JAKARTA	5,536,210,520.00
9	KANSAR SEMARANG	8,018,301,011.00
10	KANSAR SURABAYA	8,620,622,957.00
11	KANSAR DENPASAR	7,986,459,566.00
12	KANSAR MATARAM	6,337,035,719.00
13	KANSAR KUPANG	5,641,154,784.00
14	KANSAR PONTIANAK	6,304,546,320.00
15	KANSAR BANJARMASIN	5,529,494,941.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	5,872,069,424.00
17	KANSAR MAKASSAR	6,519,957,489.00
18	KANSAR KENDARI	6,295,415,645.00
19	KANSAR MANADO	5,489,213,724.00
20	KANSAR AMBON	6,167,275,676.00
21	KANSAR BIAK	5,267,549,820.00
22	KANSAR JAYAPURA	5,662,421,177.00
23	KANSAR SORONG	5,058,976,418.00
24	KANSAR MERAUKE	5,350,865,782.00
25	KANSAR TIMIKA	4,928,503,038.00
26	KANSAR JAMBI	2,822,559,665.00
27	KANSAR P. PINANG	3,004,354,958.00
28	KANSAR BANDUNG	4,530,907,937.00
29	KANSAR PALU	3,049,926,113.00
30	KANSAR TERNATE	1,988,001,705.00
31	KANSAR BENGKULU	2,806,451,687.00
32	KANSAR LAMPUNG	2,854,303,057.00
33	KANSAR GORONTALO	2,411,777,954.00
34	KANSAR MANOKWARI	2,157,802,947.00
35	BALAI DIKLAT	1,607,333,851.00
36	YOGYAKARTA	4,161,060,307.00
TOTAL		325,329,860,088.00

Belanja Barang
Rp607.306.887.336,
00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 (Audited) dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp607.306.887.336,00 dan Rp563.056.111.289,00. Terjadi Kenaikan sebesar Rp44.250.776.047,00 atau 7,86% Hal ini disebabkan adanya penambahan aset dan pemeliharaan dan pada bulan juni Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kena efisiensi sebesar Rp73.600.000.000,00 sesuai dengan No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi belanja barang K/L dalam pelaksanaan anggaran 2017 tetapi tidak mempengaruhi penurunan yang signifikan.

sebagaimana terinci pada perbandingan rincian Belanja Barang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah sebagai berikut:

Tabel. 16
Perbandingan rincian belanja Barang T.A 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN	TA 2017	TA 2016	%
Belanja Barang Operasional	109,797,284,605.00	39,242,656,716.00	179.79
Belanja Barang Non Operasional	131,749,239,150.00	241,044,296,522.00	(45.34)
Belanja Barang Persediaan	48,977,011,218.00	8,356,111,633.00	486.12
Belanja Jasa	44,825,292,644.00	30,466,658,595.00	47.13
Belanja Pemeliharaan	226,508,275,785.00	197,365,472,351.00	14.77
Belanja Perjalanan dlm negeri	44,724,450,829.00	43,792,732,764.00	2.13
Belanja Perjalanan Luar negeri	1,101,321,886.00	3,166,643,200.00	(65.22)
Jumlah Bruto	607,682,876,117.00	563,434,571,781.00	7.85
Pengembalian belanja	(375,988,781.00)	(378,460,492.00)	(0.65)
Jumlah Netto	607,306,887,336.00	563,056,111,289.00	7.86

Belanja Barang Non Operasional digunakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain Rapat Kerja Basarnas, Diklat PIM, Penyusunan RKA K/L dan Seleksi CPNS, terdiri dari:

Tabel. 16a
Rincian Belanja Barang Non Operasional TA 2017

No	URAIAN	TA 2017
1	Belanja Bahan	23,501,072,749.00
2	Belanja Honor Output Persediaan	2,417,789,500.00
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105,830,376,901.00
	Jumlah Bruto	131,749,239,150.00
	Pengembalian Belanja	(94,235,163.00)
	Jumlah Netto	131,655,003,987.00

Belanja Pemeliharaan digunakan antara lain untuk pengadaan komponen untuk pemeliharaan Helikopter B105, *Periodic Inspections (PI)* Helikopter 500 Jam, Penggantian ARD Lift No.5, Penggantian Pipa Solar pada Ruang Genset, Penggantian Karpet, terdiri dari:

Tabel. 16b
Rincian Belanja Pemeliharaan TA 2017

No	URAIAN	TA 2017
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33,993,086,395.00
2	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,039,000.00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan Lainnya	1,196,809,000.00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,510,916,235.00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	4,249,253,450.00
6	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,310,501,551.00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,139,670,154.00
8	Belanja Pemeliharaan Lainnya	42,000,000.00
	Jumlah Bruto	226,508,275,785.00
	Pengembalian Belanja	(58,159,558.00)
	Jumlah Netto	226,450,116,227.00

Tabel. 17
Rincian Belanja Barang 31 Desember 2017 per masing-masing Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		BARANG (Rp)
1	BASARNAS	207,193,465,761.00
2	KANSAR ACEH	13,722,549,852.00
3	KANSAR MEDAN	15,636,958,594.00
4	KANSAR PADANG	10,689,893,300.00
5	KANSAR P. BARU	9,672,247,985.00
6	KANSAR TJ PINANG	15,372,586,618.00
7	KANSAR PALEMBANG	10,746,216,412.00
8	KANSAR JAKARTA	13,971,173,100.00
9	KANSAR SEMARANG	14,068,928,879.00
10	KANSAR SURABAYA	12,660,537,339.00
11	KANSAR DENPASAR	12,251,140,912.00
12	KANSAR MATARAM	9,831,132,935.00
13	KANSAR KUPANG	12,201,485,310.00
14	KANSAR PONTIANAK	11,809,805,488.00
15	KANSAR BANJARMASIN	12,871,578,753.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	13,634,318,425.00
17	KANSAR MAKASSAR	13,655,865,350.00
18	KANSAR KENDARI	14,867,594,505.00
19	KANSAR MANADO	11,435,676,866.00
20	KANSAR AMBON	12,924,679,281.00
21	KANSAR BIAK	14,499,159,478.00
22	KANSAR JAYAPURA	11,565,530,350.00
23	KANSAR SORONG	12,977,723,140.00
24	KANSAR MERAUKE	9,563,690,924.00
25	KANSAR TIMIKA	10,260,337,698.00
26	KANSAR JAMBI	7,478,167,716.00
27	KANSAR P. PINANG	8,152,329,372.00
28	KANSAR BANDUNG	9,685,467,208.00
29	KANSAR PALU	10,364,626,489.00
30	KANSAR TERNATE	11,732,818,221.00
31	KANSAR BENGKULU	7,566,410,929.00
32	KANSAR LAMPUNG	8,605,455,327.00
33	KANSAR GORONTALO	10,547,583,271.00
34	KANSAR MANOKWARI	6,855,507,195.00
35	BALAI DIKLAT	12,108,645,040.00
36	YOGYAKARTA	6,125,599,313.00
TOTAL		607,306,887,336.00

Belanja Modal
Rp1.547.326.518.77
7,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2017 (Audited) dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.547.326.518.777,00 dan Rp1.371.216.736.596,00, terjadi kenaikan sebesar Rp176.109.782.181,00 atau 12.84% Hal ini disebabkan karena adanya Penambahan APBN-P pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Nomor: S-584/MK.02/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Tabel. 18
Perbandingan rincian belanja Modal 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN	TA 2017 (Rp)	TA 2016 (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	788,942,500.00	5,084,204,000.00	(84.48)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,395,218,497,852.00	1,295,506,987,454.00	7.70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144,392,665,865.00	70,197,494,110.00	105.69
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,073,425,544.00	451,216,983.00	137.90
Belanja Modal Fisik Lainnya	5,868,159,000.00	-	100.00
Jumlah Belanja Modal Kotor	1,547,341,690,761.00	1,371,239,902,547.00	12.84
Pengembalian Belanja	(15,171,984.00)	(23,165,951.00)	(34.51)
Jumlah Belanja Modal Bersih	1,547,326,518,777.00	1,371,216,736,596.00	12.84

Tabel. 19
Rincian Belanja Modal Desember T.A 2017 per masing-masing Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		MODAL (Rp)
1	BASARNAS	1,383,200,519,401.00
2	KANSAR ACEH	5,320,662,535.00
3	KANSAR MEDAN	2,792,162,728.00
4	KANSAR PADANG	4,137,440,950.00
5	KANSAR P. BARU	2,108,132,121.00
6	KANSAR TJ PINANG	4,398,438,000.00
7	KANSAR PALEMBANG	3,525,294,318.00
8	KANSAR JAKARTA	6,369,057,000.00
9	KANSAR SEMARANG	3,634,828,537.00
10	KANSAR SURABAYA	6,416,598,280.00
11	KANSAR DENPASAR	5,829,260,750.00
12	KANSAR MATARAM	3,009,036,025.00
13	KANSAR KUPANG	5,616,520,500.00
14	KANSAR PONTIANAK	3,873,681,332.00
15	KANSAR BANJARMASIN	8,030,764,000.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	1,882,052,200.00
17	KANSAR MAKASSAR	3,248,737,659.00
18	KANSAR KENDARI	6,684,920,000.00
19	KANSAR MANADO	3,119,653,000.00
20	KANSAR AMBON	2,891,166,787.00
21	KANSAR BIAK	2,380,817,000.00
22	KANSAR JAYAPURA	2,004,142,500.00
23	KANSAR SORONG	1,362,978,000.00
24	KANSAR MERAUKE	3,217,503,129.00
25	KANSAR TIMIKA	3,034,288,800.00
26	KANSAR JAMBI	3,191,670,000.00
27	KANSAR P.PINANG	3,718,042,751.00
28	KANSAR BANDUNG	9,616,393,541.00
29	KANSAR PALU	5,604,040,753.00
30	KANSAR TERNATE	2,984,998,000.00
31	KANSAR BENGKULU	2,675,549,900.00
32	KANSAR LAMPUNG	4,824,565,500.00
33	KANSAR GORONTALO	3,652,792,978.00
34	KANSAR MANOKWARI	3,628,207,416.00
35	BALAI DIKLAT	26,363,719,960.00
36	YOGYAKARTA	2,977,882,426.00
TOTAL		1,547,326,518,777.00

Belanja Modal
Tanah
Rp788.942.500,00

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 (Audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp788.942.500,00 dan Rp5.084.204.000,00 belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar (Rp4.295.261.500,00) atau (84,48%) dengan perbandingan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI	REALISASI	%
	2017	2016	
Belanja Modal Tanah	-	1,033,050,000.00	(100.00)
Belanja Modal Pembuatan sertifikat	-	-	
Belanja modal pengurukan dan pematangan tanah	788,942,500.00	4,051,154,000.00	(80.53)
Total	788,942,500.00	5,084,204,000.00	(84.48)

Tabel. 21
Rincian Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Desember T.A 2017 (Audited) per Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		TANAH (Rp)
1	KANSAR PONTIANAK	194,560,000.00
1	KANSAR MAKASSAR	494,582,500.00
2	KANSAR BENGKULU	99,800,000.00
TOTAL		788,942,500.00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.395.210.273.
152,00

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 (Audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.395.210.273.152,00 dan Rp1.295.506.986.079,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp99.703.287.073,00 atau 7.70% dengan perbandingan adalah sebagai berikut:

Tabel. 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,395,169,864,652.00	1,295,473,516,324.00	7.70
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	48,633,200.00	-	100.00
belanja penambahan nilai peralatan dan mesin	-	33,471,130.00	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	1,395,218,497,852.00	1,295,506,987,454.00	7.70
Pengembalian	(8,224,700.00)	(1,375.00)	598,060.00
Jumlah Belanja	1,395,210,273,152.00	1,295,506,986,079.00	7.70

Tabel. 23
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Desember T.A 2017 (Audited)
per Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		PERALATAN dan MESIN (Rp)
1	BASARNAS	1,369,406,618,410.00
2	KANSAR ACEH	239,500,000.00
3	KANSAR MEDAN	1,597,145,000.00
4	KANSAR PADANG	539,260,750.00
5	KANSAR P. BARU	1,120,828,000.00
6	KANSAR TJ PINANG	-
7	KANSAR PALEMBANG	896,215,818.00
8	KANSAR JAKARTA	1,156,626,000.00
9	KANSAR SEMARANG	692,605,037.00
10	KANSAR SURABAYA	2,347,496,380.00
11	KANSAR DENPASAR	127,416,850.00
12	KANSAR MATARAM	1,018,972,025.00
13	KANSAR KUPANG	473,242,000.00
14	KANSAR PONTIANAK	965,974,332.00
15	KANSAR BANJARMASIN	1,078,305,000.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	589,040,100.00
17	KANSAR MAKASSAR	731,832,000.00
18	KANSAR KENDARI	810,500,000.00
19	KANSAR MANADO	399,646,000.00
20	KANSAR AMBON	325,450,000.00
21	KANSAR BIAK	242,117,000.00
22	KANSAR JAYAPURA	320,050,000.00
23	KANSAR SORONG	499,830,000.00
24	KANSAR MERAUKE	324,549,500.00
25	KANSAR TIMIKA	1,129,123,300.00
26	KANSAR JAMBI	885,974,000.00
27	KANSAR P.PINANG	701,483,000.00
28	KANSAR BANDUNG	673,145,000.00
29	KANSAR PALU	504,364,000.00
30	KANSAR TERNATE	398,720,000.00
31	KANSAR BENGKULU	575,243,900.00
32	KANSAR LAMPUNG	1,098,460,000.00
33	KANSAR GORONTALO	396,093,500.00
34	KANSAR MANOKWARI	279,881,000.00
35	BALAI DIKLAT	1,967,900,000.00
36	YOGYAKARTA	696,665,250.00
TOTAL		1,395,210,273,152.00

Belanja Modal
 Gedung dan
 Bangunan
 Rp144.385.718.58
 1,00

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 (Audited) dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp144.385.718.581,00 dan Rp70.174.329.534,00 terjadi kenaikan sebesar Rp74.211.389.047,00 atau 105.75% dengan perbandingan adalah sebagai berikut:

Tabel. 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 (Audited)
dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133,009,044,918.00	64,684,432,960.00	105.63
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	8,550,000.00	-	-
Perencanaan dan Pengawasan Gedung, Bangunan	10,610,633,947.00	5,328,597,200.00	99.13
Perjalanan Gedung dan Bangunan	21,000,000.00	-	-
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	743,437,000.00	184,463,950.00	303.03
Jumlah Belanja Kotor	144,392,665,865.00	70,197,494,110.00	105.69
pengembalian belanja	(6,947,284.00)	(23,164,576.00)	(70.01)
Jumlah Belanja	144,385,718,581.00	70,174,329,534.00	105.75

Tabel. 25
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember T.A 2017 (Audited)
per Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		GEDUNG dan BANGUNAN (Rp)
1	BASARNAS	7,925,741,991.00
2	KANSAR ACEH	5,081,162,535.00
3	KANSAR MEDAN	1,195,017,728.00
4	KANSAR PADANG	3,598,180,200.00
5	KANSAR P. BARU	987,304,121.00
6	KANSAR TJ PINANG	4,398,438,000.00
7	KANSAR PALEMBANG	2,629,078,500.00
8	KANSAR JAKARTA	5,212,431,000.00
9	KANSAR SEMARANG	2,942,223,500.00
10	KANSAR SURABAYA	4,069,101,900.00
11	KANSAR DENPASAR	5,701,843,900.00
12	KANSAR MATARAM	1,990,064,000.00
13	KANSAR KUPANG	5,143,278,500.00
14	KANSAR PONTIANAK	2,713,147,000.00
15	KANSAR BANJARMASIN	6,952,459,000.00
16	KANSAR BALIKPAPAN	1,293,012,100.00
17	KANSAR MAKASSAR	1,518,314,109.00
18	KANSAR KENDARI	5,874,420,000.00
19	KANSAR MANADO	2,720,007,000.00
20	KANSAR AMBON	2,565,716,787.00
21	KANSAR BIAK	2,138,700,000.00
22	KANSAR JAYAPURA	1,684,092,500.00
23	KANSAR SORONG	863,148,000.00
24	KANSAR MERAUKE	2,323,537,135.00
25	KANSAR TIMIKA	1,905,165,500.00
26	KANSAR JAMBI	2,305,696,000.00
27	KANSAR P. PINANG	3,016,559,751.00
28	KANSAR BANDUNG	8,943,248,541.00
29	KANSAR PALU	5,099,676,753.00
30	KANSAR TERNATE	2,586,278,000.00
31	KANSAR BENGKULU	2,000,506,000.00
32	KANSAR LAMPUNG	3,726,105,500.00
33	KANSAR GORONTALO	3,256,699,478.00
34	KANSAR MANOKWARI	3,348,326,416.00
35	BALAI DIKLAT	24,395,819,960.00
36	YOGYAKARTA	2,281,217,176.00
TOTAL		144,385,718,581.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp1.073.425.544,
00

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal TA 2017 (Audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.073.425.544,00 dan Rp451.216.983,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp622.208.561,00 atau sebesar 137,90%. dengan perbandingan adalah sebagai berikut

Tabel. 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Desember TA 2017 (Audited) dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	%
Belanja Modal Jalan dan jembatan	503,729,494.00	284,200,000.00	77.24
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	65,687,000.00	13,150,000.00	399.52
Belanja Irigasi	397,910,000.00	103,948,983.00	282.79
Belanja Jaringan	-	49,918,000.00	(100.00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	106,099,050.00	-	100.00
Jumlah Belanja Kotor	1,073,425,544.00	451,216,983.00	137.90
Pengembalian Belanja	-	-	-
TOTAL	1,073,425,544.00	451,216,983.00	137.90

Tabel. 27
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember T.A 2017 (Audited) per Satker Kerja

NO	SATUAN KERJA	REALISASI
		JALAN, IRIGASI dan JARINGAN (Rp)
1	KANSAR MAKASAR	504,009,050.00
2	KANSAR MERAUKE	569,416,494.00
TOTAL		1,073,425,544.00

Belanja Modal
Lainnya
Rp5.868.159.000,
00

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal TA 2017 (Audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.868.159.000,00 dan Rp0,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp5.868.159.000,00 atau 100,00%. Belanja Modal lainnya sebesar Rp5.868.159.000,00 merupakan Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat yang akunnnya dicatat sebagai Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I sehingga masuk ke dalam Aset Tak Berwujud. Belanja tersebut terdapat pada Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Tabel. 28
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Desember TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2017	T.A. 2016	%
Belanja Modal Lainnya	5,868,159,000.00	-	100.00
Jumlah Belanja Kotor	5,868,159,000.00	-	100.00
Pengembalian Belanja	-	-	-
TOTAL	5,868,159,000.00	-	100.00



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(NERACA)**

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp42.031,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Basarnas) per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp42.031,00 dan Rp58.400.000,00.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp42.031,00 tersebut terdapat pada Kantor SAR Jakarta.

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp717.308.000,00

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) oke

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) sebesar Rp717.308.000,00 dan Rp968.052.055,00 dengan rincian sebagai berikut Perpanjangan pekerjaan Lisensi GIS sebesar Rp395.833.000,00 bulan Januari sampai dengan 9 Juni 2018 dan perpanjangan pekerjaan Lisensi Oracle Rp321.475.000,00 bulan Januari sampai dengan 3 April 2018.

Piutang Bukan
Pajak PNPB
Rp28.928.600.000,
00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing adalah sebesar Rp28.928.600.000,00 dan Rp28.928.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 29
Perbandingan Rincian Piutang PNPB 31 Desember 2017 (*audited*) dan 2016 (*audited*)

KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
Piutang PNPB	28.928.600.000,00	28.928.600.000,00
Jumlah	28.928.600.000,00	28.928.600.000,00

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNPB pada Basarnas berasal dari piutang Sewa Gedung PT. Merpati Nusantara Airline (MNA) pada Kantor Pusat dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo awal T.A 2015 Piutang PNPB adalah sebesar Rp19.231.400.000,00;
- Kontrak PT. MNA 01 Maret 2014 s/d 28 Feb 2015 Rp5.625.600.000,00;
- PT. MNA 01 Maret 2015 s/d 28 Feb 2016 Rp2.457.600.000,00;
- Merpati Training Center (MTC) 01 Maret 2017 s/d 28 Februari 2018 Rp1.614.000.000,00.

Penyisihan Piutang
tak tertagih piutang
Lancar
(Rp27.322.670.000
,00)

C.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar (Rp27.322.670.000,00) dan (Rp20.047.790.000,00) Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:

Tabel. 30
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih–Piutang Lancar 31 Desember 2017 (*audited*)

Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai
Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1,614,000,000.00	0.50%	8,070,000.00
Macet	5,625,600,000.00	100%	5,625,600,000.00
Macet	2,457,600,000.00	100%	2,457,600,000.00
Macet	19,231,400,000.00	100%	19,231,400,000.00
Jumlah	28,928,600,000.00		27,322,670,000.00
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	28,928,600,000.00		27,322,670,000.00

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp1.605.930.000,0
0

C.1.5. Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang Bukan Pajak Netto per 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar Rp1.605.930.000,00 yang merupakan hasil pengurangan dari Piutang Bukan Pajak.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/T
GR
Rp5.220.000,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan. Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar Rp5.220.000,00 merupakan cicilan pertama atas pembayaran aset yang hilang berupa kendaraan roda dua (motor).

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih
(Rp26.100,00)

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang, nilai penyisihan per 31 Desember 2017 (*audited*) tersebut sebesar (Rp26.100,00) merupakan nilai penyisihan dari piutang Rp5.220.000,00.

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan
Rp5.193.900,00

C.1.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dan piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, nilai Bagian Lancar tuntutan Ganti Rugi Netto per 31 Desember 2017 (*audited*) sebesar Rp5.193.900,00, merupakan hasil pengurangan dari nilai piutang dikurangi penyisihan.

Persediaan
Rp152.152.104.71
2,00

C.1.9. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing adalah sebesar Rp152.152.104.712,00 dan Rp108.678.780.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 31
Perbandingan Rincian Persediaan 31 Desember 2017 (*audited*) dan 2016 (*audited*)

PERSEDIAAN	2017 (<i>audited</i>)	2016 (<i>audited</i>)
Barang Konsumsi	28.156.902.748,00	21.278.063.655,00
Amunisi	3.093.480,00	62.009.480,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	43.993.811,00	149.519.025,00
Bahan Baku	977.517.300,00	1.124.317.725,00
Suku Cadang	113.462.369.961,00	76.836.938.146,00
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.432.836.890,00	1.389.302.840,00
Persediaan tuk tujuan strategis	7.946.648.271,00	7.616.141.959,00
Persediaan Lainnya	128.742.251,00	222.488.023,00
JUMLAH	152.152.104.712,00	108.678.780.853,00

Rincian Jenis Persediaan 31 Desember 2017 diantaranya terdiri dari:

1. Barang Konsumsi diantaranya seperti Perlengkapan Lapangan senilai Rp18.197.543.100,00 Barang Cetak senilai Rp13.300.000,00 dan Penutup Kaki senilai Rp62.141.200,00;
2. Bahan Baku diantaranya seperti Bahan Bakar Minyak senilai Rp216.285.300,00;
3. Suku Cadang diantaranya seperti Suku Cadang Alat Angkutan Udara Bermotor senilai Rp102.884.724.961,00, Suku Cadang Alat Laboratorium Umum senilai Rp166.452.000,00 dan Suku Cadang Alat Komunikasi senilai Rp9.936.960.000,00;
4. Persediaan untuk tujuan strategis diantaranya seperti Persediaan untuk tujuan strategis lainnya senilai Rp223.611.850,00 berupa Kantong Mayat, Sarung tangan latex, dan Rescue Square Meal.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan pada lampiran.

Tanah

Rp303.615.044.275

,00

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

Nilai Tanah yang dimiliki Basarnas per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp303.615.044.275,00 dan Rp295.988.170.730,00 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Tabel. 32
Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 31 Desember 2017 (*audited*)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	295.988.170.730,00
Mutasi tambah:	
Barang berlebih hasil inventarisasi	6.444.427.951,00
Hibah	105.000.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai	666.195.000,00
Pengembangan melalui KDP	788.942.500,00
Penyelesaian pembangunan melalui KDP	569.416.494,00
Reklasifikasi Masuk	29.908.381.600
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	(30.855.490.000,00)
Saldo per 31 Desember 2017	303.615.044.275,00
Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	303.615.044.275,00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap tanah dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Peralatan dan

Mesin

Rp7.910.772.864.0

82,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp7.910.772.864.082,00 dan Rp6.739.147.011.994,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel. 33
Rincian Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin 31 Desember 2017 (*audited*)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	6.739.147.011.994,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	87.886.241.502,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.307.924.077.150,00
Reklasifikasi Masuk	613.390.329.135,00
Transfer Masuk	895.737.225.650,00
Pengembangan Nilai Aset	59.366.000,00
Saldo Awal	249.464.300,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	185.960.000,00
Koreksi Pencatatan	85.959.773.775,00
Perolehan Lainnya	234.137.256,00
Reklas dari Aset lainnya ke Aset Tetap	482.650.000,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(895.737.225.650,00)
Reklas Keluar	(755.881.844.659,00)
penghapusan	(39.094.500,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(148.834.080.171,00)
Koreksi Pencatatan	(19.991.127.700,00)
Saldo per 31 Desember 2017	7.910.772.864.082,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(3.772.425.810.436,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	4.138.347.053.646,00

Jumlah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin *netto* sebesar Rp1.395.210.273.152,00, dipergunakan untuk:

1. Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp87.005.890.102,00 sedangkan sisa pembelian sebesar Rp880.351.400,00 menggunakan Belanja Barang;
2. Belanja modal ekstrakomtable sebesar Rp34.979.900,00;
3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp59.366.000,00;
4. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp185.960.000,00;
5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.307.924.077.150,00.

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp871.645.179.87
6,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp871.645.179.876,00 dan Rp693.285.656.382,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel. 34
Rincian Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan 31 Desember 2017 (*audited*)

Hibah Masuk	46.788.000,00
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	101.908.818.837,00
Koreksi Pencatatan	17.776.696.024,00
Pembelian	234.278.000,00
Pengembangan Melalui KDP	46.059.261.509,00
Pengembangan Nilai Aset	1.461.291.241,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	91.352.492.794,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	432.693.000,00
Reklas Masuk	30.213.017.804,00
Reklas Masuk Hasil Inventarisasi	1.191.355.000,00
Transfer Masuk	522.863.000,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(68.933.288.848,00)
Reklas Keluar	(29.178.826.271,00)
Reklas Keluar Hasil Inventarisasi	(4.414.737.607,00)
Transfer Keluar	(522.863.000,00)
Koreksi Revaluasi	(32.975.529.989,00)
Saldo per 31 Desember 2017	871.645.179.876,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(87.502.161.506,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	784.143.018.370,00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Gedung dan Bangunan dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp46.592.688.404,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp46.592.688.404,00 dan Rp37.384.048.773,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel. 35
Rincian Mutasi Transaksi Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2017 (*audited*)

Saldo per 31 Desember 2016	37.384.048.773,00
Mutasi tambah:	
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	3.206.988.000,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	5.792.593.478,00
Reklas Masuk	445.204.000,00
Reklas Masuk Hasil Inventarisasi	3.223.342.607,00
Koreksi Pencatatan Nilai	267.964.000,00
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	1.884.492.584,00
Koreksi Revaluasi	11.888.310.544,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	(3.944.945.477,00)
Koreksi Pencatatan	(2.683.992.454,00)
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	(9.827.857.651,00)
Reklas Keluar	(1.043.460.000,00)
Saldo per 31 Desember 2017	46.592.688.404,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(14.326.273.749,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	32.266.414.655,00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp19.284.334.945,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah Rp19.284.334.945,00 dan Rp9.356.315.345,00.

Tabel. 36
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2017 (*audited*)

Saldo per 31 Desember 2016	9,356,315,345.00
Mutasi tambah:	
Reklas Masuk	10,391,418,600.00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(186,195,000.00)
Penghentian aset dari penggunaan	(9,240,000.00)
Reklas Keluar	(267,964,000.00)
Saldo per 30 September 2017	19,284,334,945.00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap lainnya dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp680.670.000,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo KDP per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp680.670.000,00 dan Rp1.142.780.000,00 terdapat pada:

1. Kantor SAR Jayapura senilai Rp48.500.000,00 berupa perencanaan pembangunan pagar keliling Pos SAR Wamena yang sudah selesai tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan tanah pada Pos SAR Wamena.
2. Balai Diklat senilai Rp632.170.000,00, merupakan perencanaan kelengkapan pembangunan balai diklat untuk fisik nya yang direncanakan tahun 2017, dikarenakan tidak terdapat anggaran/efisiensi maka pengerjaan tersebut dikerjakan ditahun 2018.

Akumulasi Aset
Tetap
Rp3.874.254.245.6
91,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing Rp3.874.254.245.691,00 dan Rp3.056.280.222.269,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 (*audited*).

Tabel. 37
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7.910.772.864.082,00	3.772.425.810.436,00	4.138.347.053.646,00
2	Gedung dan Bangunan	871.645.179.876,00	87.502.161.506,00	784.143.018.370,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.592.688.404,00	14.326.273.749,00	32.266.414.655,00
4	Aset Tetap Lainnya	19.284.334.945,00	-	19.284.334.945,00
Akumulasi Penyusutan		8.848.295.067.307,00	3.874.254.245.691,00	4.974.040.821.616,00

Aset Tak Berwujud
Rp157.063.868.35
5,00

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Tak Berwujud (ok)

Aset Tetap tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (Aset Tetap tak Berwujud) per tanggal 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*) adalah Rp157.063.868.355,00 dan Rp130.224.468.950,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 38
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud 31 Desember 2017 (Audited)

Saldo per 31 Desember 2016	130.224.468.950,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	8.137.360.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai	3.446.559.325,00
Pembelian	684.000.000,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	5.868.159.000,00
Reklas Masuk	127.714.138.630,00
Transfer Masuk	7.884.140.000,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(7.884.140.000,00)
Koreksi Pencatatan	(116.221.677.800,00)
Penghentian aset dari penggunaan	(2.789.139.750,00)
Saldo per 31 Desember 2017	157.063.868.355,00
Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(69.605.396.465)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	87.458.471.890,00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset tak berwujud dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Aset Lain-lain

Rp219.142.248.577,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*) adalah Rp219.142.248.577,00 dan Rp69.646.712.858,00 Aset Lain-lain berupa BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Basarnas serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas Basarnas yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain Aset Tetap yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut.

Tabel. 39
(salah pengurangan nilai buku seharusnya saldo dikurangi akumulasi penyusutan)
Rincian Mutasi Aset Lain-lain 31 Desember 2017 (Audited)

Saldo per 31 Desember 2016	69.646.712.858,00
Mutasi tambah:	
Penghentian aset dari penggunaan	3.465.000,00
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	151.651.594.921,00
Mutasi kurang:	
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	(482.650.000,00)
Penghapusan	(1.676.874.202,00)
Saldo per 31 Desember 2017	219.142.248.577,00
Akumulasi penyusutan	58.911.411.450,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	160.230.837.127,00

Rincian atas mutasi tambah dan mutasi kurang aset lain-lain dijelaskan lebih rinci pada lampiran CALK ini.

Dari Aset Lain-lain sebesar Rp219.142.248.577,00 di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, salah satunya berupa tanah seluas 6.650 M² yang di atasnya berdiri bangunan Gedung Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tanah Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berlokasi di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav.2-3 Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 masih belum berstatus hak milik oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan walaupun telah dibeli dan dibayar lunas oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanah dibeli dari PT Merpati Nusantara Airlines sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan antara PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan Badan SAR Nasional Nomor A.4/08/X/2009 dan Nomor PERJ-09/X/BSN-09 tanggal 27 Oktober 2009. Namun tanah masih tercatat di Sekretariat Negara di Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.

Pada saat pembelian, tanah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan nomor: 934/Gunung Sahari Selatan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024. Atas status tanah tersebut diharapkan oleh Basarnas dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam proses untuk perubahan status kepemilikan, telah diadakan rapat yang dihadiri oleh perwakilan DJKN (Dirjen kekayaan Negara), PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran), dan Sekretariat Negara, untuk membahas hal tersebut. Dalam keputusan rapat diketahui bahwa tanah di gedung PT MNA perlu mendapatkan izin dari PPKK (Pusat Pengelola Komplek Kemayoran) karena berada di wilayah Eks Bandara Kemayoran.

Untuk mendapatkan izin dari PPKK tersebut, PT MNA harus membayar 20% dari harga jual tanah ke PPKK, karena dalam Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah (SP3T) antara PPKK dan PT MNA dahulu disebutkan apabila tanah dialihkan ke pihak lain maka PPKK berhak menerima 20% dari harga jual tanah, selanjutnya PPKK dapat mengeluarkan rekomendasi pembuatan sertifikat tanah menjadi milik Basarnas.

PT MNA telah membuat kesepakatan dengan PPKK untuk melunasi 20% dari nilai jual tanah dengan cara dicicil selama 2 tahun agar dapat diproses sertifikat kepemilikan tanah Badan SAR Nasional, namun sampai saat ini PT MNA belum melunasi cicilannya, sehingga sampai Tahun Anggaran 2017 ini belum dapat diproses kepemilikan sertifikat tanahnya.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp128.516.807.915,00

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar Rp128.516.807.915,00 dan Rp64.336.727.803,00.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2017.

Tabel. 40
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	157.063.868.355,00	(69.605.396.465,00)	87.458.471.890,00
2	Aset Lain-lain	219.142.248.577,00	(58.911.411.450,00)	160.230.837.127,00
Akumulasi Penyusutan		376.206.116.932,00	(128.516.807.915,00)	247.689.309.017,00

Utang Pada Pihak
Ketiga
Rp1.241.445.972,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp1.241.445.972,00 dan Rp1.917.561.577,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan), Utang kepada Pihak Ketiga terdapat di:

1. Kantor SAR Medan Rp100.709.100,00 berupa;
 - a. Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp100.196.600;
 - b. Pembayaran Listrik Bulan Desember 2017 sebesar Rp512.500.
2. Kantor SAR Pekanbaru Rp2.094.006,00 berupa:
 - a. Kekurangan Gaji Bulan November s/d Desember 2017 Tunjangan Fungsional Perawat sebesar Rp480.000,00;
 - b. Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp1.487.100,00;
 - c. Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp780,00;
 - d. Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp90.090,00;
 - e. Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat Oktober s/d Desember 2017 sebesar Rp36.036,00.

3. Kantor SAR Pontianak Rp80.177.000,00 berupa:
 - a. Tagihan Langganan Air PDAM Kantor SAR Pontianak bulan Desember 2017 sebesar Rp76.000,00;
 - b. Beban Barang Non Operasional lainnya, Biaya Pengerahan Potensi dan Operasi SAR bulan Desember 2017 sebesar Rp68.291.000,00;
 - c. Beban Perjalanan Dinas bulan Desember 2017 sebesar Rp11.810.000,00.
4. Kantor SAR Banjarmasin Rp37.249.392,00 berupa:
 - a. Beban pemakaian listrik Dermaga Banjarmasin, Pos SAR Sampit, dan Pos SAR Kotabaru bulan Desember 2017 sebesar Rp9.509.928,00;
 - b. Beban pemakaian telepon Kantor SAR Banjarmasin, Pos SAR Sampit, dan Pos SAR Kotabaru bulan Desember 2017 sebesar Rp6.232.311,00;
 - c. Beban pemakaian air Kantor SAR Banjarmasin, Pos Dermaga, Pos Bandara, Pos SAR Sampit dan Pos Kotabaru bulan Desember 2017 sebesar Rp2.797.153,00;
 - d. Beban uang makan PNS mulai tanggal 16 Desember s/d 31 Desember 2017 sebesar Rp18.710.000,00.
5. Kantor SAR Denpasar Rp196.067.650,00 berupa pembelian BBM Kapal untuk KN Arjuna 229 sebanyak 19 ton.
6. Kantor SAR Biak Rp95.653.000,00 berupa:
 - a. Biaya Tunjangan Resiko Tinggi Bulan Desember 2017 yang belum terbayarkan karena pagu minus sebesar Rp66.900.000,00;
 - b. Biaya Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2017 sebesar Rp28.753.000,00.
7. Kantor SAR Tanjung Pinang Rp20.511.486,00 berupa:
 - a. Belanja Listrik yang diakrualkan di bulan Januari sebesar Rp14.449.114,00;
 - b. Belanja Telepon yang di Akrualkan di Bulan Januari sebesar Rp2.330.832,00;
 - c. Belanja Air yang di Akrualkan di Bulan Januari sebesar Rp1.273.900,00;
 - d. Belanja Internet yang di Akrualkan di Bulan Januari sebesar Rp2.457.640,00.
8. Kantor SAR Bandung Rp10.922.498,00;
 - a. Pemakaian Langganan Listrik bulan Desember 2017 sebesar Rp 7.528.731,00;
 - b. Pemakaian Langganan Telepon bulan Desember 2017 sebesar Rp2.067.509,00;
 - c. Pemakaian Langganan Internet bulan Desember 2017 sebesar Rp1.280.858,00;
 - d. Pemakaian Langganan Air bulan Desember 2017 sebesar Rp45.400,00.
9. Kantor SAR Lampung Rp1.563.400,00 berupa Akrual atau beban air di bulan Desember 2017;

10. Kantor SAR Yogyakarta Rp15.587.834,00 berupa;
- a. Pemakaian Langganan Listrik bulan Desember Tahun 2017 pada Kantor Yogyakarta sebesar Rp10.553.841,00;
 - b. Pemakaian Langganan Listrik bulan Desember Tahun 2017 pada Pos Congot sebesar Rp651.103,00;
 - c. Pembayaran Langganan Air bulan Desember Tahun 2017 pada Kantor SAR Yogyakarta sebesar Rp1.000.300,00;
 - d. Pembayaran Langganan telepon No 0274 6498080 sebesar Rp767.834,00;
 - e. Pembayaran langganan telepon No 0274 6498557 bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp358.086,00;
 - f. pembayaran langganan telepon No 0274 6497900 bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp34.070,00;
 - g. Pembayaran langganan internet No 0143 113100127 bulan Desember tahun 2017 pada Kantor SAR Yogyakarta sebesar Rp1.155.300,00;
 - h. Pembayaran langganan internet No 0143 136100415 bulan Desember pada Kantor SAR Yogyakarta sebesar Rp1.067.300,00;
11. Kantor SAR Jakarta Rp239.188.413,00 berupa;
- a. Pembayaran Uang Makan Bulan Desember selama 8 hari kerja sebesar Rp14.277.000,00;
 - b. Penggantian Biaya Operasi SAR sebesar Rp33.303.250,00;
 - c. Sisa Tagihan Listrik Tahun 2016 yang masih belum dibayarkan sebesar Rp191.608.163,00.
12. Kantor SAR Semarang Rp313.364.243,00 berupa;
- a. Pembayaran listrik yang tertunggak bulan Desember 2017 sebesar Rp15.071.151,00;
 - b. Pembayaran telepon yang tertunggak bulan Desember 2017 sebesar Rp1.642.052,00;
 - c. Pembayaran air yang tertunggak bulan Desember 2017 sebesar Rp789.040,00;
 - d. Pembayaran operasi yang tertunggak thn 2017 sebesar Rp295.862.000,00.
13. Kantor SAR Kendari Rp44.030.000 berupa;
- a. Ops SAR diperairan p.batu tgl 1 November 2017 sebesar Rp6.910.000,00;
 - b. Ops SAR diperairan Wangi-wangi tanggal 22 s/d 23 November sebesar Rp3.000.000,00;
 - c. Ops Sar Musibah KMP Liner tute baubau-kendari tanggal 23 November 2017 sebesar Rp4.500.000,00;
 - d. Ops Sar di perairan di daerah lasalimu sebesar Rp18.200.000,00;

- e. Ops perairan 15 mil Timur pada 26 s/d 27 November 2017 sebesar Rp3.300.000,00;
 - f. Ops SAR KM. Aldi Pratama GT 39 karena mati mesin di perairan Lasalimu Kab. Buton tgl 1 Desember 2017 sebesar Rp4.630.000,00;
 - g. Ops SAR KM. Nursinta GT 6 rute T.Pinang-Wanci mati mesin di perairan Kabaena Kab. Buton Utara tgl 18 Desember 2017 sebesar Rp3.490.000,00.
14. Kantor SAR Mataram Rp84.377.950,00 berupa:
- a. Tagihan Air bulan Desember sebesar Rp1.677.950,00;
 - b. TRP Bulan Desember sebesar Rp82.700.000,00.

Hibah yang belum
disahkan
Rp2.562.416.876,0
0

C.4.2. Hibah yang belum disahkan

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp2.562.416.876,00 dan Rp2.515.628.876,00. Hibah yang belum disahkan sampai dengan akhir tahun 2016 pada Basarnas terdapat pada:

- a) Kantor SAR Bandung Rp1.954.121.876,00 terdiri dari:
 - 1. Hibah Tanah Tasikmalaya sebesar Rp1.907.333.876,00 yang berasal dari Pemkab Tasikmalaya seluas 5600 m2, lokasi di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya. Nomor MOU hibah: MOU.13/IX/BSN-2015, 073/KSD.MOU-8/PEM/X/2015 tanggal 7 September 2015.
 - 2. Hibah Pos Security sebesar Rp46.788.000,00 yang berasal dari Bank Mandiri sesuai dengan BAST No. 06.Br.RCK/0573/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
- b) Kantor SAR Banjarmasin Rp608.295.000,00 terdiri dari:
 - 1. Bupati Kotawaringin Barat dengan luas tanah 8.000 m2 senilai Rp108.360.000,00 lokasi di Jalan Raya Pasir Panjang Desa Batu Belamaan, Kecamatan Kumai, Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat. BAST Hibah Tanah No. 027/109/VIII/2017/BP.3 tanggal 4 Agustus 2017. Dokumen kepemilikan tanah hibah tersebut masih dalam proses oleh BPN.
 - 2. Pemerintah Provinsi Kal-Sel dengan luas tanah 20.000 m2 Senilai Rp499.935.000,00 lokasi di Jalan Tegal Arum Kelurahan Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. BAST Hibah No. BA/PL.201/1/237/III/SARBJM tanggal 16 Maret 2017. Dokumen kepemilikan tanah hibah tersebut masih dalam proses oleh BPN.

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp481.495.900,00

C.4.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) sebesar Rp481.495.900,00 dan Rp225.919.033,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNBPN yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Dimuka pada Basarnas terdapat pada:

1. Kantor Pusat, sebesar Rp433.352.633,00 berupa
 - a. Pendapatan atas sewa Bank Mandiri periode Januari s/d februari 2018 Rp148.019.300,00;
 - b. Pendapatan atas sewa MTC periode Januari s/d februari 2018 Rp269.000.000,00;
 - c. Pendapatan sewa ATM Bank Mandiri periode Januari s/d februari 2018 Rp3.500.000,00;
 - d. Pendapatan sewa Telkomsel periode Januari s/d April 18 Rp12.833.333,00;
2. Kantor SAR Bandung, berupa pendapatan atas sewa ATM BRI Januari s/d Desember 2017 sebesar Rp30.742.100,00.
3. Kantor SAR Ambon berupa pengakuan pendapatan atas sewa gedung Kantor SAR Ambon lama di Bandara Ambon oleh PT. AIR NAV sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp17.401.167,00.

Uang Muka dari
KPPN Rp42.031,00

C.4.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) masing-masing sebesar Rp42.031,00 dan Rp58.400.000,00 merupakan UP atau TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN sebesar Rp42.031,00 terdapat pada Kantor SAR Jakarta akibat terlambatnya Penyetoran Sisa Uang Muka Persediaan ke KPPN.

Ekuitas
Rp5.676.221.022.772,00

C.5. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2017 (*audited*) dan 31 Desember 2016 (*audited*) adalah masing-masing sebesar Rp5.676.221.022.772,00 dan Rp4.969.426.748.382,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.6. CATATAN PENTING LAINNYA

Pada periode Semester II Tahun Anggaran 2017 ini, Helikopter dengan jenis Dolphin HR3602 milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami kecelakaan di Gunung Butak, Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya pada tanggal 2 Juli 2017 saat melakukan pemantauan di daerah tersebut.

Dengan jatuhnya Helikopter tersebut dan kondisi yang rusak berat maka Satuan Kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sedang dalam proses Penghapusan aset peralatan mesin berupa Helikopter dan telah dikoreksi SIMAK BMN.

E.7. Pengungkapan Lainnya

Berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali BMN/D pemerintah diamanatkan untuk melakukan Inventarisasi dan penilaian kembali (Revaluasi) BMN, menindaklanjuti hal tersebut telah diterbitkan PMK No. 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Berdasarkan Pengaturan dalam Perpres dan PMK tersebut, telah dilaksanakan Revaluasi terhadap sebagian objek Revaluasi pada tahun 2017 s/d 2018 atas aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan jembatan serta Irigasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 41
Rincian Nilai Revaluasi

No	Akun	Nama Akun	Nilai sebelum Revaluasi	Nilai sesudah Revaluasi	Selisih
1	133111	Gedung dan Bangunan	659.194.531.359	648.878.271.000	(10.316.260.359)
2	134112	Irigasi	2.065.310.800	654.331.000	(1.410.979.800)
3	134111	Jalan dan Jembatan	16.436.527.453	7.001.142.000	(9.435.385.453)
4	131111	Tanah	274.442.270.650	883.497.997.825	609.055.727.175
5	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.400.160.478		(76.400.160.478)
6	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	506.123.405		(506.123.405)
7	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.717.956.526		(9.717.956.526)

Untuk itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) telah melakukan Koreksi Revaluasi (*nilai revaluasi BMN terdapat pada lampiran II surat direktur akuntansi dan pelaporan keuangan dirjen perbendaharaan NO. S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018*) dengan melakukan Jurnal Koreksi di aplikasi SAIBA (E-rekon) menggunakan Menu Satker Konsolidasi (SATKON) tanpa menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LO)**

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp2.652.777.517,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan pada 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.652.777.517,00 dan Rp10.417.180.987,00 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel. 42
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN	2017	2016	%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	284.441.470,00	72.702.810,00	291,24
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.359.500.333,00	10.344.462.409,00	(77,19)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	8.835.714,00	-	100,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	15.768,00	(100,00)
TOTAL	2.652.777.517,00	10.417.180.987,00	(74,53)

1. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp284.441.470,00 terdiri dari:

Tabel. 43
Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan TA 2017 (audited) dan 2016

NO	KANTOR SAR	NILAI
1	Badan SAR Nasional	53,252,457.00
2	Kantor SAR Surabaya	14,354,253.00
3	Kantor SAR Jayapura	9,601,500.00
4	Kantor SAR Kupang	29,082,810.00
5	Kantor SAR Pangkal Pinang	120,300.00
6	Kantor SAR Bengkulu	2,000,245.00
7	Kantor SAR Manokwari	17,362,410.00
8	Balai Diklat	95,779,836.00
9	Kantor SAR Jakarta	58,547,940.00
10	Kantor SAR Mataram	399,000.00
11	Kantor SAR Sorong	3,940,719.00
	TOTAL	284,441,470.00

2. Pendapatan sewa Tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp2.359.500.333,00 merupakan pendapatan yang didapat dari:
 - a. Kantor Pusat sebesar Rp2.327.769.134,00 terdiri dari:

Tabel. 44
Rincian Pendapatan Sewa Kantor Pusat TA 2017 (audited) s/d 2018

NO	KETERANGAN	PENDAPATAN 2017 S/D 2018	PENDAPATAN 2018	PENDAPATAN 2017
1	pengakuan atas pembayaran ATM Bank Mandiri 01 maret 2017 s/d 28 Feb 2018 NTPN.8892820SSCIAUBV8 Tgl 30 des 2017	21,000,000.00	3,500,000.00	17,500,000.00
2	pembayaran atas sewa PT.Digital frame indonesia (PT.DFI) untuk penempatan LED 5 unit periode sept 2016 s/d sept 2017 NTPN.BF95A00159LUTFVF Tgl 6 nov 2017	11,790,000.00	-	11,790,000.00
3	pengakuan atas pembayaran Bank Mandiri 01 maret 2017 s/d 28 Feb 2018 NTPN. B84B0735RVKFV0LO tanggal 7 sept 2017	888,115,800.00	148,019,300.00	740,096,500.00
4	pembayaran atas sewa PT.Telkomsel untuk penempatan antena dan fiber optik di baseman periode 01 mei 2017 s/d 30 april 2018, NTPN. 56E9D0OE0LV3G2P tgl 21 des 2017	38,500,000.00	12,833,333.00	25,666,667.00
5	pembayaran kekurangan sewa PT.MTC periode 01 maret 2017 s/d 28 feb 2018 dengan no bukti NTPN : 415F75MK6I852JLP tanggal 28 des 2017	1,214,000,000.00	202,333,333.00	1,011,666,667.00
6	pembayaran atas sewa PT.Fokus media indonesia (PT.FMI) untuk penempatan LED 3 unit periode sept 2016 s/d sept 2017 no NTPN. 982386GPA0RLJVO8 tanggal 20 November 2017	20,790,000.00	-	20,790,000.00
7	pembayaran kekurangan sewa PT.MTC periode 01 maret 2017 s/d 28 feb 2018 dengan no bukti NTPN : 0996071U8GH7SK19 tanggal 30 mei 2017	400,000,000.00	66,666,667.00	333,333,333.00
8	Pengakuan atas sewa PT.Telkomsel 01 Jan s/d 30 april 2017	11,666,667.00	-	11,666,667.00
9	Pengakuan atas sewa Bank Mandiri 01 Jan s/d 29 Feb 2017	148,019,300.00	-	148,019,300.00
10	Pengakuan atas sewa PT.Piterson Tanos 01 Jan s/d 29 Feb 2017	3,740,000.00	-	3,740,000.00
11	Pengakuan atas sewa ATM Bank Mandiri 01 Jan s/d 29 Feb 2017	3,500,000.00	-	3,500,000.00
	TOTAL	2,761,121,767.00	433,352,633.00	2,327,769,134.00

- b. Pengakuan Pendapatan Kantor SAR Ambon sebesar Rp20.881.399,00 dari penyewaan gedung kantor SAR Ambon di bandara yang disewa oleh Perusahaan AirNav, dok.sumber SSBP tahun 2017 dengan No. NTPN90D3065HFV0SGUM2 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp20.881.400,00 untuk sewa 1 tahun terhitung dari November 2016 sampai dengan November 2017;
- c. Kantor SAR Bandung sebesar Rp10.849.800,00 dari penyewaan tanah kantor untuk ATM BRI diakui lewat jurnal penyesuaian, dok.sumber SSBP tahun 2015 dengan No. NTPN 151203852441 tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp54.250.000,00 untuk sewa 5 tahun terhitung dari Januari 2015 sampai dengan Januari 2019.

3. Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp8.835.714,00 dari Kantor SAR Palu sebesar Rp555.000,00 dan Kantor SAR Timika sebesar Rp8.280.714,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016 Persatuan Kerja:

Tabel. 45
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satuan Kerja 31 Des 2017 (audited)

NO	KANTOR SAR	Nilai pend.dari denda keterlambatan (423752)	pendapatan anggaran Lain-lain (423999)	Pendapatan atas sewa gedung dan bangunan	TOTAL
1	KANTOR PUSAT	53,252,457.00	-	2,327,769,134.00	2,381,021,591.00
2	SURABAYA	14,354,253.00	-	-	14,354,253.00
3	AMBON	-	-	20,881,399.00	20,881,399.00
4	JAYAPURA	9,601,500.00	-	-	9,601,500.00
5	KUPANG	29,082,810.00	-	-	29,082,810.00
6	PANGKAL PINANG	120,300.00	-	-	120,300.00
7	BANDUNG	-	-	10,849,800.00	10,849,800.00
8	PALU	-	555,000.00	-	555,000.00
9	BENGKULU	2,000,245.00	-	-	2,000,245.00
10	MANOKWARI	17,362,410.00	-	-	17,362,410.00
11	BALAI DIKLAT	95,779,836.00	-	-	95,779,836.00
12	JAKARTA	58,547,940.00	-	-	58,547,940.00
13	TIMIKA	-	8,280,714.00	-	8,280,714.00
14	MATARAM	399,000.00	-	-	399,000.00
15	SORONG	3,940,719.00	-	-	3,940,719.00
	TOTAL	284,441,470.00	8,835,714.00	2,359,500,333.00	2,652,777,517.00

Tabel. 46
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Satuan Kerja 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	Kantor Pusat	2,381,021,591.00	10,343,720,375.00
2	Surabaya	14,354,253.00	1.00
3	Ambon	20,881,399.00	3,480,234.00
4	Jayapura	9,601,500.00	-
5	Kupang	29,082,810.00	-
6	Mataram	399,000.00	-
7	Pangkal Pinang	120,300.00	-
8	Bandung	10,849,800.00	10,849,800.00
9	Ternate	-	15,767.00
10	Bengkulu	2,000,245.00	-
11	Gorontalo	-	22,876,000.00
12	Manokwari	17,362,410.00	36,238,810.00
13	Palu	555,000.00	-
14	Balai Diklat	95,779,836.00	-
15	Jakarta	58,547,940.00	-
16	Timika	8,280,714.00	-
17	Sorong	3,940,719.00	-
	TOTAL	2,652,777,517.00	10,417,180,987.00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp325.452.002.464,00 dan Rp319.852.967.147,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan beban pegawai disebabkan karena naiknya tunjangan fungsional PNS yang signifikan dibandingkan tahun lalu yaitu Tunjangan Rescuer yang merupakan tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan fungsional Rescuer sesuai dengan yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer.

Tabel. 47
Rincian Beban Belanja Pegawai TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN	TA 2017	TA 2016	%
Beban Gaji Pokok PNS	111,796,356,338.00	110,726,560,129.00	0.97
Beban Pembulatan Gaji PNS	2,065,488.00	1,632,109.00	26.55
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	7,308,324,328.00	6,790,877,623.00	7.62
Beban Tunj. Anak PNS	1,835,284,958.00	1,634,910,082.00	12.26
Beban Tunj. Struktural PNS	2,442,280,000.00	2,365,170,000.00	3.26
Beban Tunj. Fungsional PNS	12,450,437,000.00	5,424,921,000.00	129.50
Beban Tunj. PPh PNS	84,591,158.00	475,615,952.00	(82.21)
Beban Tunj. Beras PNS	7,068,328,030.00	6,718,576,900.00	5.21
Beban Uang Makan PNS	21,044,731,400.00	20,440,434,552.00	2.96
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	191,100,000.00	197,175,000.00	(3.08)
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1,746,175,000.00	1,827,839,600.00	(4.47)
Beban Tunjangan SAR PNS	30,756,245,000.00	30,126,120,000.00	2.09
Beban Tunjangan Umum PNS	3,294,284,902.000	5,616,424,046.00	(41.35)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	125,431,998,862.000	127,506,710,154.00	(1.63)
	325,452,202,464.00	319,852,967,147.00	1.75

Berikut adalah rincian beban pegawai per masing-masing kantor.

Tabel. 48
Rincian Beban Pegawai Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	BADAN S.A.R NASIONAL (BASARNAS)	149,618,356,279.00	150,793,731,139.00
2	KANTOR SAR SURABAYA	8,601,260,227.00	8,378,490,987.00
3	KANTOR SAR MEDAN	7,258,162,058.00	6,500,152,799.00
4	KANTOR SAR PADANG	5,140,876,523.00	5,043,132,957.00
5	KANTOR SAR PEKANBARU	4,969,308,158.00	4,828,209,284.00
6	KANTOR SAR PONTIANAK	6,304,546,320.00	6,147,007,284.00
7	KANTOR SAR BANJARMASIN	5,548,204,941.00	5,403,170,989.00
8	KANTOR SAR BALIKPAPAN	5,872,069,424.00	5,713,710,484.00
9	KANTOR SAR MENADO	5,489,213,724.00	5,246,300,056.00
10	KANTOR SAR UJUNG PANDANG	6,519,957,489.00	6,467,109,907.00
11	KANTOR SAR AMBON	6,167,275,676.00	5,856,695,456.00
12	KANTOR SAR DENPASAR	7,986,459,566.00	7,763,236,711.00
13	KANTOR SAR MERAUKE	5,350,865,782.00	5,315,166,439.00
14	KANTOR SAR BIAK	5,363,202,820.00	5,237,724,532.00
15	KANTOR SAR JAYAPURA	5,662,421,177.00	5,538,352,534.00
16	KANTOR SAR KUPANG	5,641,154,784.00	5,449,142,716.00
17	KANTOR SAR TANJUNG PINANG	6,052,617,353.00	5,623,581,211.00
18	KANTOR SAR PALEMBANG	4,135,784,069.00	4,057,333,552.00
19	KANTOR SAR SORONG	5,058,976,418.00	4,969,665,335.00
20	KANTOR SAR JAMBI	2,822,559,665.00	2,594,485,434.00
21	KANTOR SAR PANGKAL PINANG	2,973,498,958.00	2,827,816,634.00
22	KANTOR SAR BANDUNG	4,530,907,937.00	4,346,512,121.00
23	KANTOR SAR PALU	3,049,926,113.00	2,843,281,280.00
24	KANTOR SAR TERNATE	1,971,315,705.00	1,838,750,524.00
25	KANTOR SAR BENGKULU	2,806,451,687.00	2,487,907,473.00
26	KANTOR SAR LAMPUNG	2,854,303,057.00	2,548,701,701.00
27	KANTOR SAR GORONTALO	2,411,777,954.00	2,176,966,268.00
28	KANTOR SAR MANOKWARI	2,157,802,947.00	2,153,995,692.00
29	BALAI DIKLAT	1,606,962,151.00	1,700,930,951.00
30	KANTOR SAR YOGYA	4,161,060,307.00	3,779,682,337.00
31	KANTOR SAR JAKARTA	5,550,437,520.00	5,790,451,658.00
32	KANTOR SAR BANDA ACEH	6,152,530,262.00	5,897,838,151.00
33	KANTOR SAR SEMARANG	8,018,301,011.00	7,517,762,544.00
34	KANTOR SAR KENDARI	6,295,415,645.00	5,956,621,502.00
35	KANTOR SAR TIMIKA	4,928,503,038.00	4,926,595,192.00
36	KANTOR SAR MATARAM	6,419,735,719.00	6,132,753,313.00
	TOTAL	325,452,202,464.00	319,852,967,147.00

Beban Persediaan
Rp41.704.969.068,0
0

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp41.704.969.068,00 dan Rp42.720.363.613,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan mengalami penurunan disebabkan karena beban persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga meliputi:

1. Kantong Mayat;
2. Rescue Square Meal (RSM01);
3. Rescue Square Meal (RSM02);
4. Rescue Square Meal (RSM03).

mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 49
Rincian Beban Persediaan TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	27,438,332,688.00	23,937,546,377.00	14.62
Beban Persediaan Amunisi	25,960,000.00	31,095,440.00	(16.52)
Beban Persediaan Pita Cukai, Ledges	1,546,000.00	4,125,000.00	(62.52)
Beban Persediaan Bahan Baku	4,235,677,727.00	4,670,096,081.00	(9.30)
Beban Persediaan Tujuan Strategis	9,251,821,586.00	13,663,104,681.00	(32.29)
Beban Persediaan Lainnya	751,631,067.00	414,396,034.00	81.38
Jumlah Beban Persediaan	41,704,969,068.00	42,720,363,613.00	(2.38)

Tabel. 50
Rincian Beban Persediaan Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	6,864,317,918.00	4,467,754,564.00
2	SURABAYA	1,257,743,365.00	1,837,676,179.00
3	MEDAN	826,167,694.00	3,057,271,937.00
4	PADANG	602,520,539.00	879,055,478.00
5	PEKANBARU	781,225,519.00	984,082,278.00
6	PONTIANAK	672,395,367.00	1,250,075,672.00
7	BANJARMASIN	950,032,055.00	1,438,468,012.00
8	BALIKPAPAN	1,759,990,225.00	2,474,105,855.00
9	MENADO	1,713,447,188.00	452,337,124.00
10	UJUNG PANDANG	1,501,136,966.00	369,811,745.00
11	AMBON	2,147,078,264.00	538,083,430.00
12	DENPASAR	1,878,369,740.00	2,531,883,318.00
13	MERAUKE	899,757,403.00	1,505,417,430.00
14	BIAK	939,804,218.00	994,076,678.00
15	JAYAPURA	736,460,775.00	730,766,745.00
16	KUPANG	366,132,448.00	1,124,300,462.00
17	TANJUNG PINANG	542,476,367.00	1,387,150,630.00
18	PALEMBANG	795,611,162.00	694,412,815.00
19	SORONG	1,176,891,908.00	1,138,304,322.00
20	JAMBI	562,390,245.00	432,433,184.00
21	PANGKAL PINANG	210,470,500.00	1,123,884,712.00
22	BANDUNG	1,222,716,382.00	2,063,624,534.00
23	PALU	688,151,484.00	119,072,030.00
24	TERNATE	1,108,683,171.00	72,968,000.00
25	BENGKULU	979,930,122.00	505,650,163.00
26	LAMPUNG	702,748,476.00	991,267,644.00
27	GORONTALO	810,474,717.00	710,758,010.00
28	MANOKWARI	804,109,342.00	595,720,876.00
29	BALAI DIKLAT	177,700,100.00	574,484,060.00
30	YOGYAKARTA	1,598,913,380.00	731,721,955.00
31	JAKARTA	996,938,226.00	2,368,028,964.00
32	BANDA ACEH	783,721,765.00	854,685,361.00
33	SEMARANG	993,267,015.00	2,068,348,911.00
34	KENDARI	1,790,806,661.00	447,112,810.00
35	TIMIKA	730,837,289.00	752,488,525.00
36	MATARAM	1,131,551,072.00	453,079,200.00
JUMLAH		41,704,969,068.00	42,720,363,613.00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp282.265.411.298,00 dan Rp262.459.251.785,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 51
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	21,541,683,663.00	17,029,209,244.00	26.50
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	18,000,000.00	(100.00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	486,270,729.00	502,384,729.00	(3.21)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	73,082,471,836.00	6,405,910,900.00	1,040.86
Beban Barang Operasional Lainnya	13,151,941,709.00	13,156,261,226.00	(0.03)
Beban Bahan	22,228,192,833.00	24,641,799,252.00	(9.79)
Beban Honor Output Kegiatan	2,417,789,500.00	10,867,335,000.00	(77.75)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	104,585,084,636.00	159,219,416,488.00	(34.31)
Beban Langganan Listrik	13,789,003,362.00	13,209,088,475.00	4.39
Beban Langganan Telepon	7,456,864,308.00	6,733,702,200.00	10.74
Beban Langganan Air	1,439,794,490.00	1,204,993,450.00	19.49
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,663,008,857.00	3,043,458,444.00	217.50
Beban Jasa Pos dan Giro	146,002,199.00	49,132,977.00	197.16
Beban jasa konsultan	459,360,000.00	1,097,250,000.00	(58.14)
Beban Sewa	2,307,448,865.00	293,803,000.00	685.37
Beban Jasa Profesi	611,735,000.00	740,400,000.00	(17.38)
Beban Jasa Lainnya	8,881,111,411.00	4,216,118,000.00	110.65
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan	12,979,900.00	30,988,400.00	(58.11)
Beban Aset Ekstrakomtabel gedung bangunan	4,668,000.00	-	-
Jumlah	282,265,411,298.00	262,459,251,785.00	7.55

Tabel. 52
Rincian Beban Barang dan Jasa Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN	2017	2016
KANTOR PUSAT	90,816,648,649.00	92,705,568,917.00
SURABAYA	6,086,405,123.00	5,628,343,509.00
MEDAN	6,835,621,374.00	6,638,161,333.00
PADANG	5,754,968,125.00	5,042,159,500.00
PEKANBARU	4,487,243,885.00	4,477,952,085.00
PONTIANAK	6,081,623,701.00	4,954,069,693.00
BANJARMASIN	5,604,533,837.00	4,769,857,397.00
BALIKPAPAN	6,153,494,639.00	5,377,429,684.00
MENADO	5,566,204,172.00	6,036,994,523.00
UJUNG PANDANG	6,729,219,594.00	6,555,644,398.00
AMBON	6,131,214,862.00	6,070,808,022.00
DENPASAR	6,162,202,123.00	5,564,659,791.00
MERAUKE	4,356,630,651.00	4,239,901,707.00
BIAK	4,625,796,207.00	4,538,107,845.00
JAYAPURA	6,441,698,900.00	6,038,581,000.00
KUPANG	5,713,838,960.00	5,520,011,646.00
TANJUNG PINANG	5,817,984,425.00	5,306,003,922.00
PALEMBANG	5,326,506,210.00	4,331,199,952.00
SORONG	5,380,104,222.00	4,892,663,181.00
JAMBI	3,949,622,577.00	3,425,892,582.00
PANGKAL PINANG	4,412,604,955.00	3,467,784,465.00
BANDUNG	4,930,745,790.00	3,914,277,670.00
PALU	4,866,133,293.00	3,764,929,966.00
TERNATE	4,535,537,476.00	4,098,209,877.00
BENGKULU	4,063,939,108.00	3,917,831,263.00
LAMPUNG	4,369,607,955.00	2,881,362,429.00
GORONTALO	4,658,023,571.00	3,610,576,150.00
MANOKWARI	3,438,750,318.00	2,538,177,619.00
BALAI DIKLAT	7,611,578,946.00	5,542,500,370.00
YOGYAKARTA	3,687,285,190.00	2,606,964,330.00
JAKARTA	7,663,897,808.00	6,681,573,972.00
BANDA ACEH	7,009,498,224.00	6,164,518,514.00
SEMARANG	7,506,379,190.00	6,462,695,535.00
KENDARI	6,339,110,483.00	5,683,017,329.00
TIMIKA	4,750,655,949.00	4,798,264,124.00
MATARAM	4,400,100,806.00	4,212,557,485.00
JUMLAH	282,265,411,298.00	262,459,251,785.00

Beban Pemeliharaan
Rp228.687.004.371,
00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp228.687.004.371,00 dan Rp223.801.001.247,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan dikarenakan adanya penambahan pada beban di bahan bakar minyak (BBM).

beban bahan untuk pemeliharaan dan beban pemeliharaan suku cadang yaitu suku cadang helikopter dan kapal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 53
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 (audited) dan 2016

Uraian	2017	2016	Naik / Turun %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.522.785.832	28.054.279.904	19,49
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.196.809.000	685.856.400	74,50
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	127.171.129.696	124.783.243.283	1,91
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.249.253.450	780.472.789	444,45
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	56.416.080.164	1.658.463.500	3.301,71
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	28.988.399.111	(99,86)
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.029.339.430	49.900.000	1.962,80
Beban persediaan suku cadang	5.059.606.799	38.800.386.260	(86,96)
JUMLAH	228.687.004.371	223.801.001.247	2,18

Tabel. 61
Rincian Beban Pemeliharaan Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	54.288.599.641,00	75.731.920.908,00
2	SURABAYA	5.678.317.945,00	3.849.081.030,00
3	MEDAN	7.829.241.920,00	7.560.141.650,00
4	PADANG	4.214.310.850,00	3.403.080.500,00
5	PEKANBARU	4.299.639.546,00	4.508.786.303,00
6	PONTIANAK	4.911.803.980,00	5.096.850.100,00
7	BANJARMASIN	6.448.899.536,00	6.110.923.812,00
8	BALIKPAPAN	6.440.761.249,00	4.026.661.368,00
9	MENADO	5.018.418.974,00	5.020.283.500,00
10	UJUNG PANDANG	6.046.735.070,00	5.827.980.694,00
11	AMBON	5.722.506.299,00	5.547.774.135,00
12	DENPASAR	4.272.611.723,00	3.872.703.483,00
13	MERAUKE	4.061.220.938,00	3.938.065.624,00
14	BIAK	8.917.473.182,00	5.071.354.400,00
15	JAYAPURA	3.929.140.000,00	4.047.575.000,00
16	KUPANG	5.887.491.100,00	5.943.885.484,00
17	TANJUNG PINANG	8.473.772.999,00	4.671.593.965,00
18	PALEMBANG	4.712.833.370,00	4.904.934.909,00
19	SORONG	6.103.315.530,00	4.539.792.563,00
20	JAMBI	2.651.994.879,00	2.314.691.500,00
21	PANGKAL PINANG	3.022.504.990,00	3.240.222.775,00
22	BANDUNG	3.971.535.056,00	3.814.650.211,00
23	PALU	4.585.065.487,00	3.349.383.254,00
24	TERNATE	6.115.302.764,00	3.144.162.781,00
25	BENGKULU	2.726.999.528,00	2.963.502.159,00
26	LAMPUNG	3.716.898.717,00	2.062.096.214,00
27	GORONTALO	5.354.028.470,00	3.182.732.000,00
28	MANOKWARI	2.320.436.569,00	1.747.304.256,00
29	BALAI DIKLAT	2.244.047.405,00	2.003.780.000,00
30	YOGYAKARTA	1.788.599.125,00	1.270.027.350,00
31	JAKARTA	4.851.702.055,00	5.801.183.400,00
32	BANDA ACEH	5.878.464.762,00	6.621.030.200,00
33	SEMARANG	6.009.522.843,00	5.343.087.450,00
34	KENDARI	7.474.868.150,00	5.749.332.770,00
35	TIMIKA	4.259.400.997,00	3.402.764.999,00
36	MATARAM	4.458.538.722,00	4.117.660.500,00
JUMLAH		228.687.004.371,00	223.801.001.247,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp45.711.969.813,00 dan Rp46.921.338.264,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi perjalanan dinas keluar negeri semakin menurun.

Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 54
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	2017	2016	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	26,793,809,953.00	17,252,443,240.00	55.30
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	79,109,587.00	105,041,900.00	(24.69)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	622,648,000.00	935,106,600.00	(33.41)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,115,080,387.00	25,462,103,324.00	(32.78)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	260,842,920.00	1,967,018,719.00	(86.74)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	840,478,966.00	1,199,624,481.00	(29.94)
JUMLAH	45,711,969,813.00	46,921,338,264.00	(2.58)

Tabel. 55
Rincian Beban perjalanan Dinas Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	21,251,095,554.00	27,347,039,401.00
2	SURABAYA	545,842,771.00	423,289,989.00
3	MEDAN	549,878,019.00	480,146,301.00
4	PADANG	565,042,550.00	467,215,800.00
5	PEKANBARU	641,614,054.00	477,623,840.00
6	PONTIANAK	557,879,294.00	504,262,016.00
7	BANJARMASIN	461,739,316.00	452,117,023.00
8	BALIKPAPAN	694,873,687.00	623,185,300.00
9	MENADO	658,988,720.00	563,201,150.00
10	UJUNG PANDANG	678,398,586.00	524,282,122.00
11	AMBON	822,682,945.00	762,837,900.00
12	DENPASAR	632,325,016.00	581,735,801.00
13	MERAUKE	951,615,077.00	656,733,308.00
14	BIAK	832,733,489.00	639,082,103.00
15	JAYAPURA	920,425,450.00	857,639,150.00
16	KUPANG	433,054,250.00	439,852,350.00
17	TANJUNG PINANG	678,162,850.00	617,595,420.00
18	PALEMBANG	455,247,632.00	391,867,886.00
19	SORONG	1,102,146,074.00	807,388,118.00
20	JAMBI	515,023,919.00	406,690,760.00
21	PANGKAL PINANG	514,952,978.00	383,920,114.00
22	BANDUNG	484,269,177.00	354,364,710.00
23	PALU	660,704,409.00	579,872,626.00
24	TERNATE	922,621,581.00	492,040,247.00
25	BENGKULU	486,130,984.00	433,866,012.00
26	LAMPUNG	367,048,455.00	347,364,228.00
27	GORONTALO	639,214,650.00	595,336,750.00
28	MANOKWARI	1,015,383,308.00	619,205,394.00
29	BALAI DIKLAT	2,168,756,889.00	1,462,270,750.00
30	YOGYAKARTA	425,956,432.00	395,215,901.00
31	JAKARTA	480,136,094.00	316,533,300.00
32	BANDA ACEH	611,958,978.00	545,416,972.00
33	SEMARANG	593,166,048.00	329,975,600.00
34	KENDARI	603,809,272.00	531,889,400.00
35	TIMIKA	1,129,716,998.00	706,391,031.00
36	MATARAM	659,374,307.00	803,889,491.00
JUMLAH		45,711,969,813.00	46,921,338,264.00

Beban barang untuk
diserahkan kepada
masyarakat
Rp1.213.558.510,00

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.213.558.510,00 dan Rp1.203.929.520,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Barang untuk diserahkan pada masyarakat milik basarnas yaitu barang hasil pengadaan kantor pusat yang di transfer ke kantor SAR daerah berupa:

1. Buku TK/SD (Berkunjung ke Kantor SAR TKSD Kelas I.II.III);
2. Buku SMP (Ayo Mengenal SAR Tingkat SD.SMP);
3. Buku SLTA I (Teknik pencarian dan pertolongan tingkat SLTA);
4. Buku SLTA II (Kelembagaan dan manajemen SAR tingkat SLTA).

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 56

Rincian Beban Brg Utk Diserahkan Kpd Masyarakat. TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1,213,558,510.00	1,203,929,520.00	0.80
Jumlah	1,213,558,510.00	1,203,929,520.00	0.80

Tabel. 57

Rincian Beban Brg Utk Diserahkan Kpd Masyarakat TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	18.661.500,00	-
2	SURABAYA	63.450.100,00	101.732.250,00
3	MEDAN	204.417.290,00	149.169.000,00
4	PADANG	39.963.000,00	37.701.000,00
5	PEKANBARU	15.454.900,00	12.824.100,00
6	PONTIANAK	-	34.023.000,00
7	BANJARMASIN	63.195.000,00	8.667.000,00
8	BALIKPAPAN	45.938.180,00	-
9	MENADO	60.791.000,00	33.040.000,00
10	UJUNG PANDANG	78.505.100,00	52.282.350,00
11	AMBON	74.585.000,00	-
12	DENPASAR	38.940.000,00	32.498.500,00
13	BIAK	88.830.000,00	25.817.000,00
14	JAYAPURA	9.504.000,00	56.423.000,00
15	KUPANG	24.519.000,00	21.667.500,00
16	TANJUNG PINANG	14.863.740,00	43.156.960,00
17	PALEMBANG	4.389.000,00	101.358.000,00
18	SORONG	9.262.200,00	26.669.500,00
19	JAMBI	16.766.090,00	42.645.330,00
20	BANDUNG	78.963.940,00	-
21	BENGKULU	21.908.200,00	10.312.500,00
22	LAMPUNG	32.783.000,00	5.575.800,00
23	GORONTALO	28.084.320,00	25.865.360,00
24	MANOKWARI	41.762.490,00	12.287.880,00
25	YOGYAKARTA	19.080.190,00	62.540.220,00
26	JAKARTA	15.589.200,00	108.772.000,00
27	BANDA ACEH	38.049.000,00	104.787.700,00
28	KENDARI	29.852.900,00	38.824.170,00
29	TIMIKA	17.998.670,00	41.220.400,00
30	MATARAM	17.451.500,00	14.069.000,00
JUMLAH		1.213.558.510,00	1.203.929.520,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp897.775.117.561,00 dan Rp707.178.592.789,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 58
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	849,115,368,473.00	740,958,561,751.00	14.60
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15,819,844,638.00	14,290,170,137.00	10.70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,813,870,530.00	1,896,525,874.00	(4.36)
Beban Penyusutan Irigasi	645,336,782.00	336,991,311.00	91.50
Beban Penyusutan jaringan	71,502,380.00	71,115,455.00	0.54
Jumlah Penyusutan	867,465,922,803.00	757,553,364,528.00	14.51
Beban Amortisasi Hak Cipta	353,275,743.00	311,611,228.00	13.37
Beban Amortisasi Software	26,909,730,301.00	14,363,797,321.00	87.34
Beban Amortisasi Lisensi	2,732,895,491.00	1,139,492,778.00	139.83
Beban Penyusutan Aset LainLain	313,293,223.00	306,929,550.00	2.07
Jumlah Amortisasi	30,309,194,758.00	16,121,830,877.00	88.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	897,775,117,561.00	773,675,195,405.00	16.04

Tabel. 59
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	344.406.078.579,00	328.800.285.101,00
2	SURABAYA	25.830.794.381,00	25.102.149.649,00
3	MEDAN	25.125.740.268,00	21.966.452.613,00
4	PADANG	15.504.828.233,00	14.146.379.801,00
5	PEKANBARU	10.218.801.247,00	9.548.526.095,00
6	PONTIANAK	11.033.664.153,00	9.703.012.775,00
7	BANJARMASIN	16.251.796.939,00	11.924.657.381,00
8	BALIKPAPAN	16.259.584.438,00	17.581.212.552,00
9	MENADO	14.582.948.974,00	14.165.021.855,00
10	UJUNG PANDANG	19.436.084.405,00	16.057.970.469,00
11	AMBON	18.603.473.307,00	12.371.319.866,00
12	DENPASAR	22.168.480.227,00	18.650.861.927,00
13	MERAUKE	6.743.262.945,00	6.530.626.674,00
14	BIAK	11.991.035.278,00	8.436.202.561,00
15	JAYAPURA	8.603.617.904,00	8.125.029.623,00
16	KUPANG	14.015.541.074,00	12.820.539.120,00
17	TANJUNG PINANG	31.645.013.838,00	16.675.228.535,00
18	PALEMBANG	13.554.527.013,00	12.951.458.874,00
19	SORONG	15.160.332.679,00	6.957.655.022,00
20	JAMBI	9.753.455.087,00	4.675.429.157,00
21	PANGKAL PINANG	13.100.772.607,00	11.030.224.886,00
22	BANDUNG	20.764.192.774,00	16.506.918.443,00
23	PALU	12.154.784.775,00	12.301.074.128,00
24	TERNATE	16.020.774.637,00	12.886.366.186,00
25	BENGKULU	11.518.577.266,00	10.570.525.021,00
26	LAMPUNG	19.141.217.523,00	12.296.688.664,00
27	GORONTALO	15.950.831.371,00	12.540.923.184,00
28	MANOKWARI	9.940.811.557,00	6.964.082.087,00
29	BALAI DIKLAT	10.110.135.196,00	7.322.842.862,00
30	YOGYAKARTA	10.525.525.536,00	7.626.100.442,00
31	JAKARTA	19.964.273.637,00	16.209.390.357,00
32	BANDA ACEH	15.486.072.011,00	14.361.094.388,00
33	SEMARANG	27.600.698.042,00	26.327.791.532,00
34	KENDARI	26.026.935.825,00	11.695.899.486,00
35	TIMIKA	8.888.298.910,00	8.352.740.474,00
36	MATARAM	9.692.154.925,00	9.492.513.615,00
JUMLAH		897.775.117.561,00	773.675.195.405,00

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp7.274.906.100,00

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.274.906.100,00 dan Rp813.338.803,00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 60
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016	% Naik/ Turun
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	7,274,880,000.	814,581,835.00	793.08
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	2,900.	(1,243,032.00)	(100.23)
3	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -	23,200.	-	100.00
JUMLAH		7,274,906,100.00	813,338,803.00	794.45

Berikut adalah rincian beban Penyisihan piutang tidak tertagih per masing-masing kantor:

Tabel. 61
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	7,274,880,000	814,521,262.00
2	SURABAYA	-	(23,965.00)
3	BALIKPAPAN	-	(414,766.00)
4	AMBON	-	(602,265.00)
5	SORONG	-	(61,400.00)
6	PANGKAL PINANG	-	(69,563.00)
7	BANDUNG	-	(10,500.00)
8	JAMBI	26,100.00	-
JUMLAH		7,274,906,100.00	813,338,803.00

Surplus/Defisit
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp351.381.262,00

D.10. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp351.381.262,00 merupakan pengurangan dari nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp476.822.769,00 dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp125.441.507,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp351.381.262,00, merupakan beban penyusutan dari aset yang ingin di hapuskan terdapat di Kantor SAR Banjarmasin, Merauke dan Bandung.

Tabel. 62
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Satuan Kerja TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	BANJARMASIN	15,574,339.00	-
2	MERAUKE	460,918,674.00	4,739,350.00
3	JAYAPURA	-	196,881,870.00
4	PALEMBANG	-	26,276,486.00
5	BANDUNG	329,756.00	-
7	YOGYAKARTA	-	2.00
8	MATARAM	-	45,815,300.00
JUMLAH		476,822,769.00	273,713,008.00

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp125.441.507,00

Tabel. 63
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Satuan Kerja 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR SAR PADANG	15,105,000.00	-
2	KANTOR SAR BANJARMASIN	6,250,000.00	18,378,000.00
3	KANTOR SAR MERAUKE	20,800,000.00	-
4	KANTOR SAR JAYAPURA	5,650,000.00	-
5	KANTOR SAR KUPANG	50,999,999.00	-
6	KANTOR SAR T.J. PINANG	8,560,000.00	-
7	KANTOR SAR PGKL. PINANG	7,500,000.00	-
8	KANTOR SAR BANDUNG	9,700,000.00	-
9	Kantor SAR YOGYAKARTA	876,508.00	-
JUMLAH		125,441,507.00	18,378,000.00

1. Kantor SAR Padang sebesar Rp15.105.000,00 berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pengembangan gedung Kantor SAR Padang. Disetor dengan No. NTPN 4895D82231FOK15P tanggal 27 April 2017.
2. Kantor SAR Banjarmasin sebesar Rp2.250.000,00 berupa pendapatan dari penghapusan asset berupa maubelair. Disetor dengan No NTPN7359E7BIAI3Q5HF2 tanggal 02 Maret 2017 Dan Rp4.000.000,00, berupa hasil lelang peralatan mesin berupa sepeda motor arashi tahun perolehan 2007 dengan No. NTPN1D48666N9GPB80K2 tanggal 20 September 2017.
3. Kantor SAR Merauke sebesar Rp20.800.000,00 berupa pendapatan dari penghapusan mobil, menara dan dermaga Kantor SAR Merauke Sebesar Rp2.800.000,00 disetor dengan No. NTPN2CF5F5D8G8QHR5FO Tanggal 27 Januari 2017 dan sebesar Rp18.000.000,00 dari penghapusan sisa bongkaran gedung Kantor SAR Merauke disetor dengan No. NTPN5A3925D2KHPIG8FO Tanggal 27 Januari 2017.
4. Kantor SAR Jayapura sebesar Rp5.650.000,00, pendapatan dari hasil penghapusan motor megapro milik Kantor SAR Jayapura. Disetor dengan No. NTPN5AEDB45CS3NBKTT8 Tanggal 22 Mei 2017.
5. Kantor SAR Kupang sebesar Rp50,999,999.00, pendapatan dari hasil lelang bongkahan bangunan gedung kantor SAR sebesar Rp15.000.000,00 disetor dengan No. NTPN36E4277MT5KPEOI2 tanggal 24 Juli 2017 dan sebesar Rp35.999.999,00 dari pelelangan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jeep disetor dengan No. NTPN. 8622867G0REGT90P tanggal 25 Oktober 2017.
6. Kantor SAR Tanjung Pinang sebesar Rp8.560.000.00, pendapatan dari hasil lelang bongkahan bangunan gedung kantor SAR disetor dengan No. NTPN 8622867G0REGT90P tanggal 25 oktober 2017.
7. Kantor SAR Pangkal Pinang sebesar Rp7.500.000.00, pendapatan dari hasil lelang BMN berupa mobil ambulan milik Kantor, Disetor dengan No. NTPN FC33A8CU3TCL0RP0 tanggal 07 November 2017.
8. Kantor SAR Bandung sebesar Rp9.700.000,00, pendapatan dari hasil penghapusan aset yang sudah tidak dipakai dalam operasi SAR. Disetor dengan No. NTPN 8B9A944IV7L72D2P Tanggal 17 Mei 2017.
9. Kantor SAR Yogyakarta sebesar Rp876,508.00, pendapatan dari hasil penghapusan aset yang sudah rusak berat berupa peralatan mesinya itu rambu tidak bersuara lainnya, disetor dengan No. NTPN760BD1LG49KRERVG, tanggal 27 september 2017.

Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan Non
Operasional
Rp37.078.515.099,0
0

D.11. Surplus/defisit Dari Kegiatan Non Operasional.beda (ok)

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp37.078.515.099,00 dan Rp84.224.598.005,00 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 (audited) dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel. 64
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 (audited) dan 2016

URAIAN	2017	2016	% Naik/ Turun
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(351,381,262.00)	(255,335,008.00)	37.62
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	125,441,507.00	18,378,000.00	582.56
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(476,822,769.00)	(273,713,008.00)	74.21
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37,429,896,361.00	84,479,933,013.00	(55.69)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional	101,009,065,868.00	89,082,615,725.00	13.39
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(63,579,169,507.00)	(4,602,682,712.00)	1,281.35
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	37,078,515,099.00	84,224,598,005.00	(55.98)

Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp37.078.515.099,00 merupakan pengurangan dari nilai Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp37.429.896.361,00 dengan Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp351.381.262,00.

- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp37.078.515.099,00 merupakan pengurangan dari nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp101.009.065.868,00 dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp63.579.169.507,00:
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp101.009.065.868,00 per masing-masing satuan kerja:

Tabel. 65
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Satuan Kerja
TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	67,246,432,223.00	83,987,920,352.00
2	SURABAYA	7,731,577.00	38,959,746.00
3	MEDAN	85,354,275.00	1,441,708,019.00
4	PADANG	93,820,300.00	9,530,541.00
5	PEKANBARU	9,613,880.00	11,445,133.00
6	PONTIANAK	66,927,604.00	15,505,200.00
7	BANJARMASIN	18,409,564.00	1,211,600.00
8	BALIKPAPAN	94,015,050.00	557,548,443.00
9	MENADO	204,042,500.00	22,969,000.00
10	UJUNG PANDANG	30,799,822.00	26,627,503.00
11	AMBON	19,203,274.00	180,971,164.00
12	DENPASAR	14,842,350.00	81,059,635.00
13	MERAUKE	111,203,598.00	1,396,776,627.00
14	BIAK	-	850,000.00
15	JAYAPURA	25,017,150.00	14,261,500.00
16	KUPANG	4,228,000.00	13,522,510.00
17	TANJUNG PINANG	21,385,650.00	848,435.00
18	PALEMBANG	55,500.00	18,500,000.00
19	SORONG	17,415,410.00	386,788,393.00
20	JAMBI	7,372,344.00	111,788,652.00
21	PANGKAL PINANG	21,840,000.00	174,742,818.00
22	BANDUNG	186,711,100.00	203,396,072.00
23	PALU	65,371,251.00	71,572,736.00
24	TERNATE	26,048,468.00	1,808,500.00
25	BENGKULU	117,322,724.00	31,117,604.00
26	LAMPUNG	8,000.00	31,704,162.00
27	GORONTALO	29,033,830.00	30,820,565.00
28	MANOKWARI	3,081,820.00	10,612,622.00
29	BALAI DIKLAT	1,023,170.00	-
30	YOGYAKARTA	4,369,942.00	528.00
31	JAKARTA	23,682,591.00	105,218,398.00
32	BANDA ACEH	95,727,662.00	35,310,710.00
33	SEMARANG	3,173,076.00	32,895,637.00
34	KENDARI	6,670,000.00	17,793,800.00
35	TIMIKA	15,368,260.00	3,272,400.00
36	MATARAM	3,738,160.00	13,556,720.00
JUMLAH		68,681,040,125.00	89,082,615,725.00
	SATKER KONSOLIDASI	32,328,025,743.00	-
JUMLAH		101,009,065,868.00	89,082,615,725.00

Satker Konsolidasi adalah Satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada Satker Lingkup K/L tersebut, dalam penyajian Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nilai yang masuk dalam **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** sebesar Rp. 32.328.025.743,00

- c. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp63.579.69.507,00 per masing-masing satuan kerja:

Tabel. 66
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Satuan Kerja
TA 2017 (audited) dan 2016

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	33,133,248,510.00	3,542,727,136.00
2	SURABAYA	1,044,540.00	21,838,635.00
3	MEDAN	2,148,850.00	561,440.00
4	PADANG	-	3,201,000.00
5	PEKANBARU	488,075.00	2,498,200.00
6	PONTIANAK	3,882,750.00	1,638,130.00
7	BANJARMASIN	3,417,815.00	1,517,500.00
8	BALIKPAPAN	30,104,900.00	62,576,950.00
9	MENADO	27,653,500.00	440,335,920.00
10	UJUNG PANDANG	8,745,900.00	499,500.00
11	AMBON	207,802,120.00	1,252,100.00
12	DENPASAR	56,357,500.00	124,119,706.00
13	MERAUKE	4,691,720.00	984,500.00
14	BIAK	-	9,251,300.00
15	JAYAPURA	-	10,000.00
16	KUPANG	371,000	1,909,000.00
17	TANJUNG PINANG	4,187,700.00	40,094,560.00
18	PALEMBANG	100,000	10,000.00
19	SORONG	4,136,746.00	94,425,165.00
20	JAMBI	675,150.00	-
21	PANGKAL PINANG	2,031,400.00	169,000.00
22	BANDUNG	64,973,610.00	152,573,110.00
23	PALU	302,316.00	7,626,100.00
24	TERNATE	112,841,532.00	-
25	BENGKULU	4,280,130.00	-
26	LAMPUNG	-	-
27	GORONTALO	25,024,665.00	36,224,850.00
28	MANOKWARI	6,000.00	1,652,800.00
29	BALAI DIKLAT	-	336,740.00
30	YOGYAKARTA	-	-
31	JAKARTA	15,246,600.00	9,780,500.00
32	BANDA ACEH	52,777,650.00	4,461,000.00
33	SEMARANG	15,806,637.00	40,210,170.00
34	KENDARI	11,799,973.00	50,000.00
35	TIMIKA	1,179,750.00	147,700.00
36	MATARAM	3,079,000.00	-
JUMLAH		33,798,406,039.00	4,602,682,712.00
1	SATKER KONSOLIDASI (KANTOR PUSAT)	29,780,763,468.00	-
JUMLAH		63,579,169,507.00	4,602,682,712.00

Satker Konsolidasi adalah Satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi tertentu yang tidak dapat dicatat pada Satker Lingkup K/L tersebut, dalam penyajian Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nilai yang masuk dalam **Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya** sebesar Rp. 29.780.763.468,00

Pos Luar Biasa
Rp0,00

D.12. POS LUAR BIASA

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL Pencarian
dan Pertolongan (BASARNAS)**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(LPE)**

Ekuitas Awal
Rp4.969.426.748.382,00

Surplus (defisit) LO
(Rp1.790.353.846.569,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0,00

Koreksi yang menambah atau Mengurangi Ekuitas
Rp21.202.482.923,00

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan
Rp1.550.077.637,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas Awal pada 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.969.426.748.382,00 dan Rp4.427.521.170.382,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah defisit sebesar (Rp1.790.353.846.569,00) dan (Rp1.576.805.606.792,00).

E.3. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) sebesar Rp0,00.

E.4. Koreksi yang menambah /Mengurangi Ekuitas

Transaksi koreksi yang menambah atau Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 sebesar Rp21.202.482.923,00 dan (Rp136.180.477.941,00).

E.5. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.6. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.550.077.637,00 dan Rp8.502.639.500,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel. 67
Rincian Koreksi Nilai Persediaan Per Satuan Kerja TA 2017 (audited)

NO	KANTOR SAR	KOREKSI
1	kantor Pusat Basarnas	141.377.500,00
2	Kantor SAR Manado	73.750.000,00
3	Kantor SAR Ambon	1.334.950.137,00
	JUMLAH	1.550.077.637,00

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

E.7. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Aset Non
Revaluasi
Rp19.484.148.295,00

E.8. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah sebesar Rp19.484.148.295,00 dan (Rp144.682.927.194,00) Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena kebijakan revaluasi nilai.

Tabel. 68
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi TA 2017 (audited)

JENIS ASET	KOREKSI TAMBAH	KOREKSI KURANG	TOTAL
Tanah	(6,163,514,551.00)	-	(6,163,514,551.00)
Peralatan dan Mesin	162,010,045,149.00	-	162,010,045,149.00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	(7,894,700.00)	-	(7,894,700.00)
Gedung dan Bangunan	(38,772,718,950.00)	-	(38,772,718,950.00)
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	(5,271,241.00)	-	(5,271,241.00)
Jalan dan Jembatan	2,829,994,794.00	-	2,829,994,794.00
Irigasi	(6,310,519,447.00)	-	(6,310,519,447.00)
Jaringan	64,478,500.00	-	64,478,500.00
Aset Tetap Renovasi	454,159,000.00	-	454,159,000.00
Aset Tetap Lainnya	(13,941,716,800.00)	-	(13,941,716,800.00)
Konstruksi Dalam pengerjaan	26,000,000.00	-	26,000,000.00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	(595,645,682)	(595,645,682.00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	287,579,479	287,579,479.00
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	(8,139,855)	(8,139,855.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	(1,908,737,464)	(1,908,737,464.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	318,572,553	318,572,553.00
TOTAL	100,183,041,754.00	(1,906,370,969.00)	98,276,670,785.00

Tabel. 69
Rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi TA 2017 (audited)

ASET LAINNYA	KOREKSI ASET LAINNYA		TOTAL
	TAMBAH	KURANG	
Akumulasi Amortisasi Lisensi	468.959.315,00	-	468.959.315,00
Akumulasi Amortisasi Software	12.579.478.515,00	1.177.338.525,00	11.402.139.990,00
Akumulasi Amortisasi Hak cipta	1.282.900.320,00	-	1.282.900.320,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	18.457.094.150,00	-	18.457.094.150,00
Lisensi	9.379.186.300,00	-	9.379.186.300,00
Software	103.359.417.505,00	-	103.359.417.505,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Reval	-	-	(26.588.878.500,00)
JUMLAH	145.527.036.105,00	1.177.338.525,00	117.760.819.080,00

Tabel. 70
Koreksi Nilai Aset dan Lainnya Non Revaluasi TA 2017 (audited) dan 2016

JENIS ASET	2017	2016
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(98.276.670.785,00)	(127.404.950.384,00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	117.760.819.080,00	(17.277.976.810,00)
TOTAL	19.484.148.295,00	(144.682.927.194,00)

Koreksi Lain-lain
Rp168.256.991,00

E.9. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah sebesar Rp168.256.991,00 dan (Rp190.247,00) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Tabel. 71
Rincian Koreksi Lain-Lain

JENIS KOREKSI	JUMLAH KOREKSI	KETERANGAN
koreksi Kewajiban	3.678.372,00	koreksi atas gaji pegawai terusan bulan desember 2016 atas 1 pegawai dibayarkan oleh pihak taspen di Balai Diklat
Koreksi Hutang	164.578.619,00	koreksi kesalahan penggunaan akun dalam penyeteroran hutang pajak yang belum disetor senilai Rp.166.290.645,00 di Kantor SAR Jakarta
JUMLAH	168.256.991,00	

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.475.945.638.036,00

E.10. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.475.945.638.036,00 dan Rp2.254.891.662.733,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel. 72
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

URAIAN	2017	2016
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	2.479.963.266.201,00	2.258.698.219.808,00
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	(3.750.460.765,00)	(3.620.232.697,00)
Transfer Keluar	(823.510.598.720,00)	(1.071.762.867.193,00)
Transfer Masuk	823.138.431.320,00	1.071.576.542.815,00
Pengesahan Hibah Langsung	105.000.000,00	-
JUMLAH	2.475.945.638.036,00	2.254.891.662.733,00

Tabel. 73
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Per masing-masing Satker

NO	URAIAN	2017	2016
1	KANTOR PUSAT	914.162.226.664,00	1.338.112.233.579,00
2	SURABAYA	40.563.875.999,00	29.087.475.263,00
3	MEDAN	35.413.372.881,00	33.710.753.449,00
4	PADANG	85.634.071.909,00	18.203.624.546,00
5	PEKANBARU	24.297.599.425,00	22.894.079.363,00
6	PONTIANAK	31.244.574.991,00	24.108.515.051,00
7	BANJARMASIN	85.886.997.261,00	26.164.720.493,00
8	BALIKPAPAN	30.175.315.547,00	84.905.094.613,00
9	MENADO	29.031.420.307,00	16.164.398.779,00
10	UJUNG PANDANG	43.304.536.730,00	75.440.404.547,00
11	AMBON	85.681.282.625,00	82.666.929.726,00
12	DENPASAR	35.358.901.914,00	33.912.580.243,00
13	MERAUKE	28.193.978.651,00	20.317.843.385,00
14	BIAK	91.149.615.596,00	20.062.879.464,00
15	JAYAPURA	27.738.241.025,00	27.548.245.251,00
16	KUPANG	43.431.841.433,00	72.749.668.347,00
17	TANJUNG PINANG	112.196.000.289,00	30.944.863.568,00
18	PALEMBANG	33.061.022.835,00	19.150.230.736,00
19	SORONG	37.032.528.869,00	20.715.516.574,00
20	JAMBI	23.317.415.948,00	17.535.941.005,00
21	PANGKAL PINANG	27.287.622.748,00	16.828.054.143,00
22	BANDUNG	36.786.015.301,00	45.579.885.701,00
23	PALU	28.772.205.532,00	21.301.565.841,00
24	TERNATE	29.171.606.608,00	27.743.375.213,00
25	BENGKULU	17.988.271.038,00	24.016.041.986,00
26	LAMPUNG	40.846.570.401,00	12.162.083.400,00
27	GORONTALO	28.856.470.321,00	17.227.196.542,00
28	MANOKWARI	75.182.481.888,00	11.102.885.451,00
29	BALAI DIKLAT	49.322.245.645,00	47.074.821.563,00
30	YOGYAKARTA	19.802.280.118,00	43.242.687.374,00
31	JAKARTA	36.861.818.002,00	55.044.331.451,00
32	BANDA ACEH	39.700.217.503,00	75.699.482.555,00
33	SEMARANG	33.796.572.786,00	26.366.041.030,00
34	KENDARI	114.197.270.257,00	23.857.195.172,00
35	TIMIKA	26.835.579.770,00	25.813.224.095,00
36	MATARAM	33.663.589.219,00	22.835.240.747,00
JUMLAH		2.475.945.638.036,00	2.510.290.110.246,00

E.10.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017 (audited):

- Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp3.750.460.765,00) yang nilainya bersumber dari nilai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
- Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp2.479.963.266.201,00 yang nilainya bersumber dari nilai realisasi belanja (RM).

E.10.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (audited) sebesar Rp823.138.431.320,00, terdiri dari:

Tabel. 74
Rincian Transfer Masuk TA 2017 (audited)

NO	URAIAN BARANG	TRANSFER MASUK
1	konsumsi	13.323.397.830,00
2	amunisi	21.566.740,00
3	bahan untuk pemeliharaan	8.363.300,00
4	suku cadang	626.123.300,00
5	barang persediaan lain untuk diserahkan masy	1.021.483.320,00
6	bahan baku	260.398.000,00
7	persediaan tuj. Strategis	7.080.112.562,00
8	persediaan lainnya	26.070.000,00
9	peralatan mesin	895.737.225.650,00
10	gedung dan bangunan	522.863.000,00
11	akm.peny.palmesin	(103.321.026.082,00)
12	akm.peny.gedung bangunan	(52.286.300,00)
13	software	7.884.140.000,00
	Jumlah	823.138.431.320,00

Tabel. 75
Rincian Transfer Masuk per masing-masing Satker TA 2017 (audited)

NO	SATKER	2017
1	KANTOR SAR SURABAYA	12.888.094.428,00
2	KANTOR SAR MEDAN	9.801.809.776,00
3	KANTOR SAR PADANG	65.680.966.136,00
4	KANTOR SAR PEKANBARU	7.550.005.167,00
5	KANTOR SAR PONTIANAK	9.319.497.105,00
6	KANTOR SAR BANJARMASIN	59.461.409.567,00
7	KANTOR SAR BALIKPAPAN	8.786.875.498,00
8	KANTOR SAR MENADO	8.986.876.717,00
9	KANTOR SAR UJUNG PANDANG	19.882.934.448,00
10	KANTOR SAR AMBON	63.730.867.155,00
11	KANTOR SAR DENPASAR	9.292.040.686,00
12	KANTOR SAR MERAUKE	10.088.656.948,00
13	KANTOR SAR BIAK	69.002.089.298,00
14	KANTOR SAR JAYAPURA	8.543.593.648,00
15	KANTOR SAR KUPANG	20.052.763.648,00
16	KANTOR SAR TANJUNG PINANG	86.380.918.318,00
17	KANTOR SAR PALEMBANG	14.653.728.036,00
18	KANTOR SAR SORONG	17.642.257.390,00
19	KANTOR SAR JAMBI	9.825.598.567,00
20	KANTOR SAR PANGKAL PINANG	12.332.016.967,00
21	KANTOR SAR BANDUNG	13.026.905.215,00
22	KANTOR SAR PALU	9.754.196.048,00
23	KANTOR SAR TERNATE	12.465.790.650,00
24	KANTOR SAR BENGKULU	5.041.367.371,00
25	KANTOR SAR LAMPUNG	24.562.246.517,00
26	KANTOR SAR GORONTALO	12.244.871.118,00
27	KANTOR SAR MANOKWARI	62.558.326.750,00
28	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN SAR NASIONAL	9.338.326.800,00
29	Kantor SAR Yogyakarta	6.542.881.722,00
30	KANTOR SAR JAKARTA	11.679.080.782,00
31	KANTOR SAR BANDA ACEH	14.480.709.654,00
32	KANTOR SAR SEMARANG	8.076.674.435,00
33	KANTOR SAR KENDARI	86.355.280.107,00
34	KANTOR SAR TIMIKA	8.620.730.948,00
35	KANTOR SAR MATARAM	14.488.043.700,00
	JUMLAH	823.138.431.320,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 (audited) sebesar (Rp823.510.598.720,00) terdiri dari:

Tabel. 76
Rincian Transfer Keluar TA 2017 (audited)

NO	URAIAN BARANG	TRANSFER KELUAR
1	konsumsi	(14.282.230.050,00)
2	amunisi	(1.546.740,00)
3	bahan untuk pemeliharaan	-
4	suku cadang	(516.687.600,00)
5	barang persediaan lain untuk diserhk	(957.792.000,00)
6	bahan baku	-
7	persediaan tuj. Strategis	(6.981.426.062,00)
8	persediaan lainnya	-
9	peralatan mesin	(895.737.225.650,00)
10	gedung dan bangunan	(522.863.000,00)
11	akm.peny.palmesin	103.321.026.082,00
12	akm.peny.gedung bangunan	52.286.300,00
13	software	(7.884.140.000,00)
	Jumlah	(823.510.598.720,00)

Tabel. 77
Rincian Transfer Keluar per masing-masing Satker TA 2017 (audited)

NO	SATKER	NILAI
1	KANTOR PUSAT	823.040.022.020,00
2	JAKARTA	470.576.700,00
	JUMLAH	823.510.598.720,00

Selisih transfer masuk dan transfer keluar sebesar (Rp372.167.400,00) merupakan selisih antara transfer masuk dan transfer keluar persediaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer masuk kapal dari Kantor Pusat ke Kantor SAR Padang, Biak, dan Manokwari dicatat sebagai transfer keluar aset pada Kantor Pusat dan transfer masuk pada Kantor SAR bersangkutan. Namun karena dalam aset tersebut terdapat barang persediaan, Kantor SAR kemudian mengkoreksi nilai aset dan mencatat persediaan dengan menggunakan menu transfer masuk persediaan sehingga mengakibatkan selisih antara nilai transfer keluar dan transfer masuk. Rincian transfer masuk persediaan tersebut sebagai berikut:
 - a. Kantor SAR Padang sebesar Rp145.973.300,00;
 - b. Kantor SAR Biak sebesar Rp248.870.600,00; dan
 - c. Kantor SAR Manokwari sebesar Rp193.633.000.

2. Adanya penyesuaian nilai persediaan atas barang yang ditransfer keluar dari Kantor Pusat. Hal ini disebabkan karena aplikasi persediaan membaca nilai terbaru jika ada transaksi atas barang persediaan yang sejenis. Selisih ini terjadi atas barang-barang sebagai berikut:
 - a. Sepatu Safety sebesar (Rp961.647.500,00);
 - b. Sarung Tangan Safety sebesar (Rp871.200,00);
 - c. Kaos Kaki sebesar (Rp1.013.100,00); dan
 - d. Kaos Dinas Lapangan sebesar Rp610.500,00.
3. Adanya kesalahan pencatatan harga satuan pada saat diinput sebagai transfer masuk, Hal ini terjadi atas:
 - a. Buku SAR Goes to School (SGTS) pada Kantor SAR Denpasar, Manado dan Biak masing-masing sebesar Rp891.000,00, Rp2.079.000,00 dan Rp297.000,00;
 - b. Extreme Weather pada Kantor SAR Manado sebesar (Rp990.000,00)

Ekuitas Akhir
Rp5.676.221.022.77
2,00

E.11. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2017 (audited) dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.676.221.022.772,00 dan Rp4.969.426.748.382,00.

Tabel. 78
Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 (audited)

URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	4.969.426.748.382,00	4.427.521.170.382,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(1.790.353.846.569,00)	(1.576.805.606.792,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	21.202.482.923,00	(136.180.477.941,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2.475.945.638.036,00	2.254.891.662.733,00
EKUITAS AKHIR	5.676.221.022.772,00	4.969.426.748.382,00

Pengungkapan
Lainnya

E.12. Pengungkapan Lainnya

Berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali BMN/D pemerintah diamanatkan untuk melakukan Inventarisasi dan penilaian kembali (Revaluasi) BMN, menindaklanjuti hal tersebut telah diterbitkan PMK No. 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN. Berdasarkan Pengaturan dalam Perpres dan PMK tersebut, telah dilaksanakan Revaluasi terhadap sebagian objek Revaluasi pada tahun 2017 s/d 2018 atas aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan jembatan serta Irigasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. 78
Nilai Revaluasi tanggal 31 Desember 2017 (audited)

No	Akun	Nama Akun	Nilai sebelum Revaluasi	Nilai sesudah Revaluasi	Selisih
1	133111	Gedung dan Bangunan	659.194.531.359	648.878.271.000	(10.316.260.359)
2	134112	Irigasi	2.065.310.800	654.331.000	(1.410.979.800)
3	134111	Jalan dan Jembatan	16.436.527.453	7.001.142.000	(9.435.385.453)
4	131111	Tanah	274.442.270.650	883.497.997.825	609.055.727.175
5	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.400.160.478		(76.400.160.478)
6	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	506.123.405		(506.123.405)
7	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.717.956.526		(9.717.956.526)

Untuk itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) telah melakukan Koreksi Revaluasi (*nilai revaluasi BMN terdapat pada lampiran II surat direktur akuntansi dan pelaporan keuangan dirjen perbendaharaan NO. S-3507/PB.6/2018 tanggal 17 April 2018*) dengan melakukan Jurnal Koreksi di aplikasi SAIBA (E-rekon) menggunakan Menu Satker Konsolidasi (SATKON) tanpa menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.



**LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

**DAFTAR REKENING
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

DAFTAR REKENING KANTOR SAR
PERIODE 31 DESEMBER 2017

No	Kantor/ Satuan	NO. REK	BANK	Rek Atas Nama
1	BASARNAS	1190005641897	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 133 BADAN SAR NASIONAL
2	ACEH	003701000155303	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 001 KANTOR SAR BANDA ACEH
3	MEDAN	105-00-8900527-0	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 123 KANTOR SAR MEDAN
4	PADANG	111-000-696-0666	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 010 KANTOR SAR PADANG
5	PEKANBARU	0185360755	(009) PT. Bank Negara Indonesia 1946	BPG 008 KANTOR SAR PEKANBARU
6	TANJUNG PINANG	017401000029306	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 009 KANTOR SAR TANJUNGPINANG
7	PALEMBANG	113-00-9101486-4	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 014 KANTOR SAR PALEMBANG
8	JAKARTA	0019718760	(009) PT. Bank Negara Indonesia 1946	BPG 133 KANTOR SAR JAKARTA
9	SEMARANG	083-01-000729-30-5	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 134 KANTOR SAR SEMARANG
10	SURABAYA	141-00-1364894-4	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 165 KANTOR SAR SURABAYA
11	DENPASAR	0046412207	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 037 KANTOR SAR DENPASAR
12	MATARAM	00-419-36-836	(009) PT. Bank Negara Indonesia 1946	BPG 038 KANTOR SAR MATARAM
13	KUPANG	1610001552210	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 039 KANTOR SAR KUPANG
14	PONTIANAK	146-00-0621076-4	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 042 KANTOR SAR PONTIANAK
15	BANJARMASIN	1002820109	(441) PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA	BPG 045 KANTOR SAR BANJARMASIN
16	BALIKPAPAN	149-00-9001632-2	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 047 KANTOR SAR BALIKPAPAN
17	MAKASSAR	0065670651	(009) PT. Bank Negara Indonesia 1946	BPG 054 KANTOR SAR MAKASSAR
18	KENDARI	162-00-0107920-2	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 060 KANTOR SAR KENDARI
19	MANADO	0066423317	(009) PT. Bank Negara Indonesia 1946	BPG 049 KANTOR SAR MANADO
20	AMBON	1520013558883	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 061 KANTOR SAR AMBON
21	BIAK	1540009813506	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 064 KANTOR SAR KELAS A BIAK
22	JAYAPURA	1540010747651	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 063 KANTOR SAR JAYAPURA
23	SORONG	031001000155303	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 066 KANTOR SAR SORONG
24	MERAUKE	0352-01-000536-30-5	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 068 KANTOR SAR MERAUKE
25	TIMIKA	154-00-0983847-9	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 141 KANTOR SAR TIMIKA
26	JAMBI	110-00-0680958-3	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 012 KANTOR SAR JAMBI
27	PANGKALPINANG	169-00-0004077-1	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 015 KANTOR SAR PANGKAL PINANG
28	BANDUNG	00000598-01-30-6	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 022 KANTOR SAR BANDUNG
29	PALU	151-00-0648159-9	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 051 KANTOR SAR PALU
30	TERNATE	010325001226304	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 062 KANTOR SAR TERNATE
31	BENGKULU	0115-01-002217-30-9	(002) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	BPG 016 KANTOR SAR BENGKULU
32	LAMPUNG	114-00-0970075-1	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 017 KANTOR SAR LAMPUNG
33	GORONTALO	1500009717669	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 050 KANTOR SAR GORONTALO
34	MANOKWARI	160-00-0085618-3	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 065 KANTOR SAR MANOKWARI
35	BALAI DIKLAT	001190006450785	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 133 BALAI DIKLAT BASARNAS
36	YOGYAKARTA	137-00-1145543-9	(008) PT. Bank Mandiri (persero)	BPG 030 KANTOR SAR YOGYAKARTA



**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
(AUDITED)
BADAN NASIONAL PENCARIAN
DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
TAHUN ANGGARAN 2017
TINGKAT - UAPA / B**

